FUNGSI UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS (UNOCHA) DALAM KOORDINASI BANTUAN KEMANUSIAAN DI GAZA 2023-2024

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

WA ODE RINGGHI WANDA RAHMATIN

21323152

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

FUNGSI UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS (UNOCHA) DALAM KOORDINASI BANTUAN KEMANUSIAAN DI GAZA 2023-2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

WA ODE RINGGHI WANDA RAHMATIN

21323152

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Fungsi *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA) dalam Koordinasi Bantuan Kemanusiaan di Gaza 2023-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

28 November 2025

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

1 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

2 Khairul Munzilin, S.IP., M.A.

3 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.

4. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 28 November 2025



Wa Ode Ringghi Wanda Rahmatin

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....i
HALAMAN PENGESAHAN.....iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....iv
ABSTRAK.....vi
BAB 1
PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Masalah.....10
1.3 Tujuan Penelitian.....10
1.4 Cakupan penelitian.....11
1.5 Tinjauan Pustaka.....11
1.6 Kerangka Pemikiran.....13
1.7 Argumen Sementara.....20
1.8 Metode Penelitian.....21
1.8.1 Jenis Penelitian.....21
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....22
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....22
1.8.4 Proses Penelitian.....22
1.9 Sistematika Pembahasan.....23
BAB 2.....24
2.1. Tindakan Genosida Israel serta Krisis Kemanusiaan di Gaza.....24
2.2 Peran UNOCHA di Gaza.....30
2.3 Tantangan dan Kendala UNOCHA di Gaza.....32
BAB 3.....38
3.1. Articulation and Aggregation.....38
3.2 Rule Application.....42
3.3 Socialization.....44
3.4 Operations Activities.....47
3.5 Information.....56
BAB 4.....59
2.1. Kesimpulan.....59
2.2 Rekomendasi.....61

ABSTRAK

Konflik Israel Palestina pada periode 2023–2024 memicu krisis kemanusiaan terbesar dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan tingginya korban sipil, runtuhnya layanan dasar, serta pengungsian massal di Gaza. Penelitian ini menganalisis upaya *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA) dalam mengkoordinasikan respons kemanusiaan selama eskalasi konflik tersebut. Menggunakan kerangka konsep fungsi organisasi internasional Clive Archer yang mencakup *articulation and aggregation of interests, rule application, socialization, operational activities,* dan *information* penelitian ini menilai bagaimana UNOCHA bekerja sebagai aktor sentral dalam penanganan krisis Gaza. UNOCHA berhasil menghimpun berbagai kepentingan aktor kemanusiaan dan menerjemahkannya ke dalam rencana respons terpadu. UNOCHA juga berperan penting dalam mendorong penerapan prinsip hukum humaniter internasional melalui pemantauan, publikasi laporan, serta penyampaian data mengenai kondisi warga sipil. Di tingkat operasional, UNOCHA mengoordinasikan klaster kesehatan, pangan, perlindungan, pendidikan, serta manajemen pengungsian, meskipun menghadapi pembatasan akses dan risiko keamanan yang tinggi. Fungsi penyediaan informasi UNOCHA menjadi pondasi penting bagi negara donor dan lembaga internasional dalam menentukan keputusan dan alokasi bantuan.

Kata kunci: Gaza, Israel-Palestina, krisis kemanusiaan, organisasi internasional, UNOCHA.

ABSTRACT

The Israel Palestine conflict during the 2023–2024 period triggered one of the most severe humanitarian crises in the past two decades, marked by high civilian casualties, the collapse of essential services, and large-scale displacement in Gaza. This study analyzes the efforts of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) in coordinating the humanitarian response throughout this escalation. Using Clive Archer's conceptual framework of international organization functions which includes articulation and aggregation of interests, rule application, socialization, operational activities, and information, this research assesses how UNOCHA operates as a central actor in addressing the crisis in Gaza. UNOCHA successfully consolidated the diverse priorities of humanitarian actors and translated them into an integrated response plan. It also played a significant role in promoting adherence to international humanitarian law through monitoring efforts, the publication of reports, and the dissemination of data on civilian conditions. At the operational level, UNOCHA coordinated clusters related to health, food assistance, protection, education, and displacement management, despite facing severe access restrictions and security risks. UNOCHA's information function served as a crucial foundation for donor states and international institutions in determining decisions and allocating aid.

Keywords: *Gaza, Israel-Palestina, humanitarian crisis, international organization, UNOCHA*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia adalah konflik Israel-Palestina. Konflik ini berasal dari ketidaksepakatan tentang klaim teritorial dan identitas nasional, yang meningkat pada awal abad ke-20 ketika Palestina masih di bawah kekuasaan Ottoman dan di bawah Mandat Inggris. Keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1947 yang membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab (Resolusi 181) memicu perang antara komunitas Yahudi dan Arab. Ketika Israel memperoleh kemerdekaan pada 14 Mei 1948, negara-negara Arab tetangganya segera menyerang, memicu Perang Arab-Israel. Terlepas dari gencatan senjata yang dicapai selama perang, tidak ada perdamaian yang permanen, ribuan pengungsi Palestina dan wilayah yang masih diperebutkan tetap hilang (Dumper 2009, dikutip dalam Nur Azhami, Nur Syafira, dan Muttaqin 2024).

Selain itu, masalah pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur juga merupakan salah satu akar utama konflik ini. Sebagian besar negara dan organisasi internasional menganggap pemukiman ini ilegal karena melanggar hukum internasional yang melarang pendudukan dan perubahan demografis di wilayah yang diduduki. Pemukiman-pemukiman ini telah menyebabkan ketegangan antara warga Palestina dan penduduk Israel, serta menghambat upaya perdamaian (Kaslam 2024, 41-42).

Konflik Palestina Israel memengaruhi dunia secara keseluruhan. Warga Palestina telah mengalami banyak kesulitan secara lokal sebagai akibat dari

konflik ini, yang mencakup banyak korban tewas, luka-luka, pengungsi, dan kerusakan infrastruktur. Menurut data dari Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, konflik telah menyebabkan sekitar 5,7 juta warga Palestina mengungsi, baik di dalam maupun di luar Palestina. Lebih dari 13.000 orang telah meninggal dunia di Gaza dan hampir 1,7 juta orang telah menjadi pengungsi sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, menurut laporan UNRWA. UNRWA menyatakan bahwa korban jiwa tersebut terdiri dari 75 persen anak-anak, wanita, dan orang dewasa (UNRWA 2021, dikutip dalam Kaslam 2024, 43).

Kemudian hal tersebut berdampak di seluruh dunia, terutama di bidang geopolitik dan keamanan internasional. Konflik Palestina-Israel telah menimbulkan ketegangan di Timur Tengah dan memicu konflik antara Israel dan negara-negara Arab, serta mendorong ekstremisme dan radikalisme di seluruh dunia. Konflik ini juga mengganggu perdagangan, investasi, dan pembangunan di daerah tersebut, secara langsung maupun tidak langsung (Kaslam 2024, 43).

Berlanjut dari latar belakang konflik tersebut, situasi semakin memburuk dengan kebangkitan tindakan yang dianggap sebagai genosida terhadap rakyat Palestina. Tindakan tersebut mencakup serangan militer yang intens, pemindahan paksa, dan pembatasan akses terhadap sumber daya dasar, yang semuanya berkontribusi pada penderitaan yang berkepanjangan dan hilangnya identitas serta hak asasi manusia bagi masyarakat Palestina. Secara singkat "Genosida" adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan sebagian atau sepenuhnya sebuah kelompok nasional, etnis, ras, atau agama (Azzahra et al. 2024, 621).

Konvensi genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 dan

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengatur serta mengakui genosida sebagai tindakan hukum internasional *(United Nations)*. Mereka yang berpendapat bahwa Israel melakukan genosida terhadap Palestina biasanya menyatakan bahwa Israel melakukan berbagai tindakan dan kebijakan untuk memburukkan dan bahkan menghancurkan Palestina, diantaranya yaitu penggunaan kekuatan militer, ini mencakup serangan militer Israel terhadap wilayah Palestina, terutama selama konflik bersenjata (United Nations 1948; International Criminal Court 1998).

Dengan meningkatnya krisis kemanusiaan dan tindakan genosida terhadap rakyat Palestina, peran UNOCHA menjadi semakin penting dalam mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dan menanggapi kebutuhan mendesak penduduk yang terkena dampak. UNOCHA mulai dibentuk oleh PBB pada tahun 1998 sebagai lembaga yang bertugas menangani dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. UNOCHA hadir di Palestina setelah terjadinya *Second Intifada* pada tahun 2000. Pada saat itu, kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina memburuk, banyak warga terluka, akses masyarakat dibatasi, fasilitas umum rusak, dan layanan dasar seperti kesehatan mulai tidak berfungsi dengan baik (United Nations Office for The Coordination of Humanitarian Affairs).

Melihat situasi tersebut, PBB mengutus UNOCHA untuk turun langsung ke wilayah Palestina. Tugas awal mereka adalah memantau keadaan, mencatat kebutuhan warga, dan membantu mengkoordinasikan berbagai lembaga yang ingin memberikan bantuan. Setelah melakukan penilaian lebih dalam, pada tahun 2003 Sekretaris Jenderal PBB resmi membentuk kantor UNOCHA di wilayah yang disebut *Occupied Palestinian Territory* (OPT). Kantor ini berlokasi di East Jerusalem agar dapat menjangkau Gaza dan *West Bank* dengan lebih mudah.

Tidak lama setelah itu, UNOCHA membuka sub kantor langsung di Gaza, salah satunya adalah *"Gaza sub-office"* yang mencakup seluruh Jalur Gaza. Tujuannya agar mereka bisa memantau keadaan dari dekat, merespons jika ada krisis, dan bekerja lebih efektif bersama organisasi lain. UNOCHA juga membuat unit koordinasi tambahan di beberapa kota di *West Bank* seperti Nablus, Ramallah, dan Hebron (United Nations Office for The Coordination of Humanitarian Affairs).

Sejak blokade diperketat pada Juni 2007, Gaza memasuki periode kemanusiaan paling panjang dan paling berat dalam sejarahnya. Setelah perubahan politik di internal Palestina, akses orang dan barang keluar–masuk Gaza dibatasi ketat. Bahan bakar tidak stabil, suplai listrik berjam-jam padam, air bersih sulit, dan banyak layanan publik berhenti berfungsi (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2007). Dalam situasi ini, UNOCHA mulai menjalankan peran penting sebagai pengumpul data, pemantau dampak blokade, dan koordinator antar lembaga kemanusiaan. Mereka mendokumentasikan bagaimana pembatasan menyebabkan ekonomi jatuh, rumah sakit kekurangan obat, serta infrastruktur air dan listrik terus melemah ("Gaza Strip Humanitarian Fact Sheet | December 2007 | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory" 2007).

Ketika memasuki *Operation Cast Lead* (2008–2009), skala kerusakan meningkat tajam. Serangan udara dan darat selama hampir tiga minggu menghancurkan ribuan rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi (United Nations Coordination of Humanitarian Affairs, 2009). Pada periode ini OCHA menerbitkan *situation report* harian,

menghitung jumlah korban, memetakan titik pengungsian, dan mengkoordinasikan penyaluran bantuan darurat antar lembaga seperti UNRWA, WHO, dan NGO internasional (Reliefweb, 2008).

Setelah itu, Gaza mengalami eskalasi berulang seperti konflik 2012 dan kemudian perang besar *Operation Protective Edge* pada 2014. Kedua periode ini memberikan dampak kerusakan yang luas: ribuan rumah hancur, sebagian wilayah Gaza lumpuh, dan layanan publik tidak dapat beroperasi. Dalam konteks ini, OCHA mulai mengintensifkan sistem *cluster coordination* yaitu koordinasi antar sektor (kesehatan, pangan, air-sanitasi, perlindungan, *shelter*). Melalui sistem ini, OCHA memastikan setiap organisasi bekerja pada wilayah atau sektor yang tepat tanpa tumpang-tindih (Reliefweb, 2014).

Mulai 2018 hingga 2019, situasi Gaza diperparah oleh rangkaian demonstrasi besar *"Great March of Return"*. Ribuan orang terluka, termasuk banyak yang mengalami luka tembak yang membutuhkan perawatan jangka panjang. OCHA mencatat angka korban secara terperinci, menyoroti tekanan besar pada sistem kesehatan, serta mengkoordinasikan bantuan medis, logistik, dan pendampingan psikososial (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2020).

Pada Mei 2021, terjadi salah satu eskalasi paling berat sejak 2014, menyebabkan kerusakan masif pada gedung-gedung, infrastruktur, jaringan listrik, jaringan air, serta ribuan keluarga kembali mengungsi. OCHA merilis *bulletin* dan *situation reports* yang memuat peta kerusakan, kebutuhan mendesak, serta hambatan akses bantuan. Koordinasi antar lembaga kembali dipimpin oleh OCHA untuk menentukan prioritas bantuan darurat seperti shelter, air bersih,

perlindungan anak, dan suplai medis (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2021).

Selain peristiwa konflik besar, Gaza menjalani kondisi kronis sepanjang 2010–2022. Listrik rata-rata hanya tersedia beberapa jam per hari, air minum sebagian besar tercemar, fasilitas kesehatan kekurangan peralatan, dan lebih dari separuh penduduk bergantung pada bantuan kemanusiaan. Dalam kondisi ini, OCHA setiap tahun menyusun *Humanitarian Needs Overview* (HNO) dan *Humanitarian Response Plan* (HRP). Dua dokumen ini menjadi dasar seluruh operasi kemanusiaan di Gaza karena memuat pemetaan kebutuhan, kerentanan, serta prioritas intervensi (United Nations Office for the Coordination of humanitarian Affairs, 2023).

Secara keseluruhan, sebelum 2023 Gaza telah mengalami blokade panjang, konflik berulang, pengungsian massal, dan keruntuhan layanan publik. Dalam semua fase ini, OCHA berperan sebagai sumber data utama, pengolah analisis kemanusiaan, dan koordinator bantuan internasional. Melalui laporan situasi, pemetaan kebutuhan, dan sistem koordinasi klaster, OCHA memastikan bahwa respons kemanusiaan di Gaza berjalan terarah, berbasis bukti, dan mampu menjangkau masyarakat yang paling rentan.

Kemudian, sebelum krisis besar pada tahun 2023, Gaza sebenarnya sudah lama mengalami kondisi kemanusiaan yang rapuh. Hal ini bukan hanya terlihat dari laporan UNOCHA, tetapi juga dari berbagai lembaga lain yang bekerja di Gaza dan memiliki sudut pandang berbeda. Jika UNOCHA menggambarkan Gaza sebagai wilayah dengan kebutuhan kemanusiaan tinggi dan memetakan kerusakan infrastruktur serta jumlah pengungsi, maka lembaga lain memberikan gambaran

yang lebih mendalam tentang bagaimana kehidupan masyarakat sehari-hari sudah berada dalam krisis jauh sebelum konflik besar terjadi.

Dari sudut pandang kesehatan, misalnya, WHO dan organisasi medis seperti *Médecins Sans Frontières* (MSF) menggambarkan secara jelas betapa lemahnya sistem layanan kesehatan di Gaza bahkan sebelum terjadi eskalasi konflik. Rumah sakit sering kekurangan listrik karena pemadaman yang berlangsung 12-16 jam per hari, generator tidak selalu punya bahan bakar, dan persediaan obat-obatan penting sering habis. MSF menjelaskan bahwa ruang operasi kerap penuh sesak saat terjadi gelombang bentrokan, dan pasien dengan luka tembak atau luka parah harus menunggu karena kapasitas rumah sakit sudah melebihi batas. Dengan kata lain, situasi kesehatan di Gaza sudah berada di ambang kolaps jauh sebelum perang besar 2023 terjadi (Human Rights Watch (HRW), 2023).

Selain kesehatan, krisis ketahanan pangan juga menjadi persoalan besar. *World Food Programme* (WFP) melaporkan bahwa lebih dari 70% penduduk Gaza sudah bergantung pada bantuan makanan, terutama karena blokade sejak 2007 membuat harga pangan naik, pasokan barang terbatas, dan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatan. Ketika konflik muncul, seperti pada 2014 atau 2021, pasar langsung lumpuh, toko-toko tutup, dan akses bantuan dibatasi, sehingga banyak keluarga hanya makan sekali sehari. WFP menggambarkan Gaza sebagai wilayah yang "secara kronis rentan terhadap kelaparan," yang diperparah oleh blokade dan kerusakan infrastruktur (ANTARA News, 2023).

Di sisi lain, organisasi hak asasi manusia seperti *Human Rights Watch* (HRW) dan *Amnesty International* melihat Gaza dari perspektif hukum humaniter

dan hak-hak warga sipil. Mereka menilai bahwa blokade yang diberlakukan sejak 2007 bukan sekadar hambatan logistik, tetapi merupakan bentuk hukuman kolektif yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat mulai dari akses air bersih, listrik, layanan kesehatan, hingga pergerakan penduduk. HRW menyebut bahwa pembatasan barang penting termasuk obat dan bahan bakar berdampak langsung pada kelangsungan hidup warga Gaza, terutama anak-anak (Human Rights Watch (HRW), halaman “News Release / Berita”, 2023).

Kemudian ada sudut pandang yang sangat penting dari UNRWA, lembaga yang bertanggung jawab untuk pengungsi Palestina. UNRWA menggambarkan kondisi sekolah yang sangat padat, di mana satu kelas bisa diisi lebih dari 40–50 murid, dan sistem pendidikan tidak mampu memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah. Klinik-klinik UNRWA pun kewalahan; satu dokter harus melayani puluhan hingga hampir seratus pasien per hari. Banyak keluarga tinggal di kamp pengungsian yang sempit, lembab, dan tidak memadai, menandakan bahwa Gaza tidak hanya mengalami krisis akibat perang, tetapi juga krisis layanan publik kronis yang sudah berlangsung puluhan tahun (Nasrullah, 2019).

Dengan menyatukan berbagai perspektif tersebut, UNOCHA memang memberikan gambaran penting mengenai kebutuhan darurat, kerusakan infrastruktur, dan koordinasi bantuan. Namun lembaga kesehatan memperlihatkan bagaimana rumah sakit hampir runtuh, lembaga pangan menggambarkan kelaparan yang terus memburuk, organisasi HAM menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang mempengaruhi kehidupan warga sipil, analis ekonomi menegaskan bahwa kemiskinan struktural adalah faktor utama kerentanan, dan

UNRWA memperlihatkan bagaimana layanan publik sehari-hari sudah berada dalam kondisi darurat jauh sebelum perang.

Pada Penelitian ini memfokuskan kajian pada *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA) sebagai subjek utama untuk mengupas masalah koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza 2023-2024. Pemilihan UNOCHA didasarkan pada mandatnya yang secara fundamental berbeda dan supra sektoral dibandingkan dengan badan-badan PBB (UN Bodies) kemanusiaan lainnya (United Nations General Assembly, 1991).

UNOCHA tidak didirikan untuk menjadi pelaksana program di lapangan (seperti mendistribusikan makanan atau obat-obatan), melainkan untuk bertindak sebagai Koordinator Sentral atau "arsitek" dari seluruh respons kemanusiaan global PBB. Peran ini memastikan efisiensi, koherensi, dan akuntabilitas dalam mobilisasi dan penyaluran bantuan di tengah krisis. Perbedaan utama dapat dilihat dari fokus operasional. Sebagian besar lembaga kemanusiaan PBB lainnya, seperti *World Food Programme* (WFP) yang berfokus pada pangan, UNICEF (Dana Anak PBB) yang berfokus pada perlindungan dan kesehatan anak, atau UNHCR (Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi) yang berfokus pada tempat tinggal dan pengungsi, memiliki mandat sektoral yang spesifik dan bertindak sebagai Badan Pelaksana (*The Implementers*) (UN System, 2019).

Sebaliknya, UNOCHA menjalankan fungsi koordinasi yang memayungi semua sektor tersebut. UNOCHA memastikan tidak terjadi tumpang tindih (duplikasi) bantuan antarsesama badan sektoral PBB dan LSM, serta memimpin mekanisme Sistem Klaster *(Cluster System)* PBB untuk merancang respons kolektif (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,

2012). UNOCHA bertindak sebagai penghubung (communicator), negosiator, dan pengelola informasi utama, yang bertanggung jawab menyusun Rencana Respons Kemanusiaan (HRP) dan mengadvokasi kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Oleh karena itu, pemilihan UNOCHA memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis mekanisme kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seluruh respons PBB di Gaza. Dengan berfokus pada UNOCHA, kajian tidak hanya terbatas pada satu aspek bantuan (misalnya kesehatan atau pangan), tetapi mampu meninjau kerangka kerja strategis dan logistik yang menyatukan semua upaya bantuan PBB dan para mitra di wilayah konflik tersebut. UNOCHA adalah mata rantai yang paling esensial dalam masalah koordinasi yang menjadi inti penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana fungsi *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA) dalam melakukan koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza pada periode 2023 sampai 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah mengenai fungsi UNOCHA dalam melakukan koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 mempunyai tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis berbagai fungsi yang dilakukan oleh UNOCHA dalam melakukan koordinasi

bantuan kemanusiaan di Gaza akibat konflik genosida Israel Palestina pada tahun 2023-2024

1.4 Cakupan penelitian

Pemilihan tahun 2023 sebagai titik awal penelitian memiliki landasan yang kuat karena momen tersebut menandai perubahan status krisis di Gaza dari situasi kemanusiaan kronis menjadi bencana skala masif dan tiba-tiba. Menurut laporan sebuah studi pada Januari 2024, tahun 2023 mencatat *"more civilian casualties ... than any year since 2010,"* dengan data bahwa selama perang 2023 terjadi 9.334 warga sipil tewas dan 3.616 terluka akibat serangan udara, bom, atau artileri (Sabbagh, Grossman, 2024). Kemudian memperpanjang cakupan penelitian hingga tahun 2024 adalah hal yang wajib (*imperatif*) karena krisis di Gaza tidak berakhir pada tahun 2023, sebaliknya, krisis memasuki fase operasi berkelanjutan yang semakin kompleks. Tahun 2023 mewakili respons awal (*emergency phase*), sementara tahun 2024 mewakili fungsi UNOCHA untuk mempertahankan dan menyempurnakan koordinasi di tengah tantangan yang berlarut-larut (OCHA, 2023). Rentang waktu 2023–2024 memberikan kerangka metodologis yang ideal untuk menganalisis proses koordinasi UNOCHA secara komprehensif.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa artikel jurnal yang menjadi referensi mengenai fungsi UNOCHA dalam melakukan bantuan kemanusiaan di Gaza pada periode 2023-2024. Jurnal yang pertama yaitu, Theresa Farhat, Sarah Ibrahim, Zahi Abdul-Sater, Ghasan Abdul-Sittah (2023) yang

berjudul *"Responding to the Humanitarian Crisis in Gaza: Damned if You Do… Damned if You Don't!"* membahas Gaza dengan sudut pandang makro dan struktural, bukan fokus pada satu lembaga tertentu. Penelitian ini menggambarkan bagaimana krisis kemanusiaan di Gaza terbentuk dari blokade berkepanjangan, kerusakan sistem kesehatan, runtuhnya layanan dasar, dan hambatan politik yang mengunci seluruh upaya kemanusiaan. Yang menjadi inti kajiannya adalah gambaran besar krisis Gaza, bukan analisis mendalam tentang bagaimana organisasi PBB seperti UNOCHA bekerja dalam koordinasi lapangan.

Dengan kata lain, jurnal Farhat et al. melihat Gaza dari sudut "kondisi krisisnya".

Kedua, jurnal dari Nasser Al-Nabit (2025) yang berjudul *"Humanitarian Collapse in Gaza: A Structural Analysis of the Shrinking Humanitarian Space"* mengapa kerja kemanusiaan di Gaza secara keseluruhan runtuh, termasuk mengapa UNOCHA dan organisasi lain tidak bisa bekerja secara normal. Penulis jurnal ini mengangkat konsep *humanitarian space*, yaitu ruang aman, netral, dan bebas dari tekanan politik tempat bantuan kemanusiaan seharusnya bisa dijalankan. Dalam konteks Gaza, ruang itu menurut penulis telah "menyusut sampai hampir hilang" akibat blokade total, serangan militer terus-menerus, keruntuhan infrastruktur, pembatasan akses, dan politisasi bantuan. Dengan kata lain, jurnal ini mengupas hambatan struktural. Nasser menyoroti bagaimana peperangan, keputusan politik, dinamika regional, dan kegagalan diplomasi internasional membuat operasi kemanusiaan, termasuk yang dipimpin oleh UNOCHA, menjadi hampir mustahil. Jurnal ini menggunakan pendekatan yang sangat teoritis dan politis, termasuk teori realisme dan analisis hukum humaniter internasional, untuk menunjukkan bahwa krisis di Gaza bukan sekadar soal

kekurangan bantuan, tetapi soal hilangnya seluruh kondisi yang diperlukan agar bantuan dapat berjalan.

Ketiga, artikel jurnal berjudul *"Satellite and AI monitoring humanitarian crises in the Gaza Strip during the early stage of Israeli–Palestinian conflict"* yang diterbitkan di *International Journal of Digital Earth* (2024). Artikel ini membahas kerusakan infrastruktur di Gaza akibat blokade dan serangan udara sejak Oktober 2023 menggunakan citra satelit malam hari dan resolusi sangat tinggi (VHR), serta model AI untuk mendeteksi pemadaman listrik (>80% hilang), kerusakan bangunan (>20% total, termasuk 60% toko/rumah sakit dan 80% infrastruktur air), dan paparan populasi rentan (36% terdampak pemadaman, 19% kerusakan bangunan). jurnal ini bersifat teknis-metodologis dengan framework AI baru untuk pemantauan cepat tanpa data pra-pasca konflik yang cocok sempurna. Jurnal menekankan aplikasi di lingkungan kompleks seperti pemukiman padat Gaza (197.048 bangunan diekstrak, akurasi 72-95%), identifikasi blok berisiko tinggi untuk alokasi bantuan prioritas, dan potensi generalisasi ke konflik atau bencana lain yang hasilnya mendukung koordinasi bantuan seperti yang dilakukan UNOCHA di Gaza

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep fungsi organisasi internasional. Organisasi Internasional didefinisikan oleh Clive Archer sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibuat dengan persetujuan antara sedikitnya dua negara yang berdaulat dengan tujuan mencapai kepentingan

bersama negara-negara, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan internasional dibawah PBB seperti ILO, UNICEF dan UNESCO.

Menurut Clive Archer, ada sembilan fungsi organisasi internasional, yaitu *Articulations and Aggregation of Interest, Norms, Recruitment, Socialization, Rule Making, Rule Application, Rule Adjudication, Information, Operations.* Pertama, *Articulations and Aggregation of Interest*, konsep fungsi *articulation and aggregation of interest* menjelaskan bagaimana organisasi internasional bekerja untuk menampung dan menyatukan berbagai kepentingan dari para anggotanya. Untuk *articulation*, organisasi internasional menjadi tempat bagi negara maupun aktor non-negara untuk menyampaikan kebutuhan, masalah, atau kepentingan mereka. Fungsi ini penting karena tidak semua pihak memiliki akses langsung untuk mempengaruhi keputusan di tingkat internasional. Melalui artikulasi, setiap suara termasuk dari kelompok yang lebih lemah atau terdampak tetap bisa disampaikan dan dipertimbangkan (Clive Archer 2001, 92-93).

Setelah berbagai kepentingan itu terkumpul, proses *aggregation* kemudian berlangsung. Pada tahap ini, organisasi internasional menggabungkan dan menyusun berbagai kepentingan yang berbeda-beda tersebut menjadi satu kesepakatan atau prioritas bersama. Proses ini melibatkan penyaringan mana isu yang paling mendesak, menyeimbangkan perbedaan pandangan, dan mengatur agar semua pihak tetap terwakili. Hasilnya adalah agenda atau arah kebijakan bersama yang bisa digunakan sebagai dasar tindakan organisasi (Clive Archer, 2001, 92-93).

Fungsi ini menjadi relevan karena tidak semua pihak memiliki akses langsung ke ruang pengambilan keputusan internasional. Melalui organisasi

internasional, suara kelompok rentan atau terdampak dapat disampaikan dan diperjuangkan secara terstruktur. Dalam hal ini, fungsi ini tidak hanya menjadi saluran komunikasi, tetapi juga alat advokasi yang mempengaruhi agenda dan respons internasional. Konsep fungsi ini membantu memahami bagaimana suatu isu dapat memperoleh perhatian global dan bagaimana organisasi internasional berperan sebagai jembatan antara kepentingan lokal dan kebijakan global (Archer 2001, 92-93).

Kedua, *Norms-Setting,* fungsi ini mengacu pada kemampuan organisasi internasional dalam merumuskan prinsip, aturan, atau standar perilaku yang dianggap pantas, sah, atau ideal dalam hubungan antarnegara maupun dalam isu-isu transnasional. Norma-norma tersebut bisa bersifat hukum (seperti konvensi atau resolusi) maupun moral (seperti prinsip hak asasi manusia, perlindungan warga sipil, atau tanggung jawab kemanusiaan). Meskipun tidak selalu mengikat secara hukum, norma-norma ini sering menjadi landasan penting dalam menilai tindakan negara atau aktor internasional lainnya, serta mendorong terciptanya praktik internasional yang lebih teratur dan manusiawi (Archer 2001, 95).

Fungsi ini penting karena tidak semua negara memiliki kekuatan atau kepentingan yang seimbang. Melalui *norm-setting*, organisasi internasional dapat menetapkan standar bersama yang mengikat secara moral atau politis, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong akuntabilitas global. Proses ini juga membuka peluang bagi isu-isu tertentu yang sebelumnya tidak dianggap penting untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan internasional (Archer 2001, 95).

Ketiga, fungsi *Recruitment*, fungsi ini mendorong aktor-aktor internasional

terutama negara dan organisasi non-negara untuk ikut serta dalam sistem internasional dan menerima nilai-nilai yang dijunjung secara global. Fungsi ini mencakup proses sosialisasi terhadap norma internasional, pelibatan dalam kerja sama multilateral, hingga integrasi ke dalam struktur dan agenda internasional. Melalui berbagai mekanisme, organisasi internasional berupaya mengajak negara-negara, kelompok masyarakat sipil, hingga individu, untuk terlibat dalam tata kelola internasional yang berbasis pada hukum, etika, dan solidaritas global. Proses ini juga menciptakan rasa memiliki terhadap sistem internasional serta memperkuat legitimasi dan efektivitas kerja sama global. Organisasi internasional menjalankan fungsi ini melalui pendidikan, pelatihan, kampanye kesadaran, hingga kemitraan strategis. Tujuannya bukan sekadar meningkatkan partisipasi, tetapi juga memastikan bahwa para aktor baru atau yang sebelumnya pasif memahami dan menghormati norma serta mekanisme kerja internasional yang telah dibentuk bersama (Archer 2001, 95).

Keempat, fungsi *Socialization*, fungsi ini mengacu pada proses di mana organisasi internasional tidak hanya memperkenalkan norma dan nilai global, tetapi juga membentuk perilaku, pola pikir, dan komitmen para aktor internasional agar sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Proses ini berlangsung terus-menerus dan tidak hanya berhenti pada perekrutan atau keterlibatan awal. Melalui sosialisasi, aktor-aktor seperti negara, organisasi non pemerintah, maupun individu didorong untuk menyesuaikan kebijakan, tindakan, dan cara berpikir mereka sesuai dengan standar global seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, tanggung jawab kemanusiaan, serta penyelesaian konflik secara damai. Hal ini dilakukan melalui forum internasional, penyusunan laporan,

pelatihan, diplomasi normatif, dan interaksi rutin antar aktor dalam organisasi tersebut. Fungsi sosialisasi penting untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan sistem internasional, karena bukan hanya aturan yang dibutuhkan, tetapi juga pemahaman bersama tentang nilai yang harus dijunjung. Sosialisasi membantu menciptakan budaya internasional yang mendukung kerjasama, akuntabilitas, dan solidaritas antar aktor global (Archer 2001, 99-100).

Kelima, fungsi *Rule Making*, Fungsi ini mencakup penyusunan konvensi, perjanjian, deklarasi, resolusi, atau protokol yang mengikat secara hukum maupun secara politis. Melalui fungsi ini, organisasi internasional tidak hanya menetapkan nilai-nilai bersama, tetapi juga menciptakan struktur hukum atau tata kelola global yang mengatur bagaimana negara dan aktor lain bertindak dalam situasi tertentu. Contohnya adalah perjanjian internasional tentang perlindungan sipil, hukum humaniter, atau pengaturan perdagangan global. Rule-making penting karena memberikan kejelasan, kepastian, dan kerangka operasional dalam hubungan internasional. Tanpa adanya aturan yang disepakati bersama, kerjasama akan berjalan tidak konsisten, dan penyelesaian konflik menjadi sulit dilakukan secara adil. Organisasi internasional membantu merumuskan aturan-aturan tersebut melalui forum deliberatif yang melibatkan berbagai aktor dengan latar belakang berbeda (Archer 2001, 101-102).

Keenam, fungsi *Rule Application*, menerapkan, memantau, dan mendorong pelaksanaan aturan-aturan internasional oleh para aktor yang terlibat. Fungsi ini mencakup penerapan teknis, asistensi kepada negara, pengawasan, hingga pelaporan pelanggaran. Organisasi internasional sering menjadi pihak yang memberikan panduan implementasi, menetapkan prosedur, atau bahkan mengirim

tim lapangan untuk memastikan aturan dijalankan dengan benar. Misalnya, dalam krisis kemanusiaan atau konflik, mereka menerapkan prinsip-prinsip perlindungan sipil yang telah disepakati dalam hukum internasional dengan cara menyediakan bantuan langsung, mendata korban, dan mendorong negara untuk mematuhi aturan tersebut (Archer 2001, 103-104).

Ketujuh, *Rule Adjudication*, menyelesaikan sengketa dan menafsirkan aturan internasional ketika terjadi pelanggaran atau perbedaan pendapat antar aktor. Fungsi ini dijalankan oleh badan-badan seperti Mahkamah Internasional (ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (ICC), atau lembaga arbitrase internasional lainnya. Melalui fungsi ini, organisasi internasional bertindak sebagai pihak yang memberikan penilaian objektif dan legal atas tindakan negara atau pihak-pihak tertentu, berdasarkan hukum yang telah disepakati. Fungsi ini juga penting untuk menjaga konsistensi dan legitimasi sistem hukum internasional, karena memungkinkan adanya jalur penyelesaian konflik yang damai, terlembaga, dan sah secara hukum. *Rule adjudication* juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas ketika suatu negara atau aktor melanggar norma internasional, proses hukum ini memberi sinyal bahwa tidak ada pihak yang kebal dari tanggung jawab. Selain itu, fungsi ini memperjelas makna aturan yang mungkin multitafsir, sehingga menciptakan kepastian hukum di tingkat global (Archer 2001, 104-105).

Kedelapan, fungsi *Information*, fungsi ini mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data serta pengetahuan terkait isu-isu internasional kepada negara-negara, lembaga, dan masyarakat global. Fungsi ini penting karena keputusan yang efektif hanya bisa dibuat jika didasarkan pada informasi yang akurat, netral, dan dapat dipercaya. Organisasi internasional seringkali memiliki

akses langsung ke lapangan dan memiliki mekanisme teknis untuk memantau kondisi di berbagai wilayah dunia. Mereka menghasilkan laporan situasi, statistik, pemetaan krisis, dan analisis kebijakan yang kemudian menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan internasional, peringatan dini, serta respons terhadap krisis. Lebih dari itu, informasi yang dihasilkan juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran global atas isu-isu yang mungkin luput dari perhatian, sekaligus menjadi alat advokasi dan legitimasi dalam mendorong tindakan kolektif. Tanpa fungsi informasi, isu-isu penting bisa saja diabaikan atau dimanipulasi oleh aktor tertentu (Archer 2001, 109-110).

Terakhir, fungsi *Operations*, fungsi ini adalah bentuk paling konkret dari peran organisasi internasional di lapangan. Melalui fungsi ini, organisasi tidak hanya menetapkan aturan atau memfasilitasi dialog, tetapi juga melaksanakan tindakan langsung untuk menangani masalah global, seperti krisis kemanusiaan, konflik bersenjata, bencana alam, kelaparan, hingga pemulihan pasca-konflik. Organisasi internasional menjalankan fungsi ini dengan mengirim misi kemanusiaan, menyediakan bantuan darurat, membangun fasilitas penting, atau menempatkan pengamat dan pasukan perdamaian. Fungsi ini menunjukan bahwa organisasi internasional bukan hanya entitas normatif, tetapi juga aktor yang aktif dan responsif terhadap kondisi nyata di dunia. Fungsi operasional sangat penting karena menjembatani antara kebijakan internasional dan kebutuhan konkret masyarakat di lapangan. Melalui tindakan nyata, organisasi internasional memperkuat legitimasi moral dan efektivitas kerja mereka, serta menjadi penghubung antara komunitas global dan individu yang terdampak langsung oleh krisis (Archer 2001, 117).

1.7 Argumen Sementara

Dalam penelitian ini, lima konsep fungsi utama organisasi internasional digunakan untuk menganalisis bagaimana UNOCHA mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina di Gaza pada tahun 2023–2024: artikulasi dan agregasi kepentingan, penerapan aturan, sosialisasi, operasi, serta fungsi informasi. Pada fungsi artikulasi dan agregasi, UNOCHA berperan sebagai fasilitator koordinasi yang menghimpun kebutuhan para aktor kemanusiaan serta menyelaraskan prioritas antara negara anggota PBB, lembaga donor, dan organisasi lokal. Melalui peran ini, UNOCHA mampu membangun arah kerja bersama yang memastikan bantuan dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran di tengah keterbatasan akses dan kondisi konflik yang berlangsung.

Kedua, melalui fungsi penerapan aturan, UNOCHA menjalankan peran untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter internasional menjadi dasar setiap langkah koordinasi. Fungsi ini diwujudkan dengan mencatat pelanggaran, menerbitkan laporan situasi, dan menggunakan temuan tersebut untuk menekan pihak-pihak yang berkonflik agar menghormati hukum internasional. Ketiga, dalam fungsi sosialisasi, UNOCHA memperkuat perhatian dan solidaritas global terhadap krisis Gaza melalui publikasi, *briefing*, kampanye advokasi, serta komunikasi dengan negara donor dan masyarakat internasional. Keempat, dalam fungsi operasional, UNOCHA mengkoordinasikan kerja lintas-klaster seperti kesehatan, pangan, perlindungan, dan logistik untuk memastikan bantuan darurat tersalurkan secara cepat dan terstruktur. Terakhir,

pada fungsi informasi, UNOCHA menyediakan data yang akurat dan kredibel mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza, yang kemudian menjadi dasar bagi aktor internasional termasuk PBB, lembaga donor, dan organisasi kemanusiaan dalam merumuskan keputusan, menentukan prioritas bantuan, dan menilai dampak krisis.

Penelitian ini hanya menggunakan lima dari sembilan konsep fungsi organisasi internasional, sebab dari semua konsep fungsi tersebut tidak semuanya relevan dengan konteks penelitian ini, Fungsi seperti *Recruitment* (fungsi perekrutan keanggotaan) atau *Rule Adjudication* (fungsi pengadilan atau peradilan aturan) lebih sesuai untuk organisasi internasional yang bersifat politik atau memiliki mekanisme peradilan (misalnya PBB secara keseluruhan atau ICJ). Sementara UNOCHA adalah badan koordinasi kemanusiaan, sehingga fokus kajian lebih tepat diarahkan pada fungsi yang langsung terkait dengan koordinasi bantuan, informasi, dan operasi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan perspektif individu atau kelompok. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu, serta perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, data yang dikumpulkan terdiri dari kata, kalimat, atau gambar, bukan angka (Nurrisa, Hermina, Norlaila 2025, 794). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis dapat menggali lebih

dalam mengenai fungsi yang dilakukan oleh UNOCHA dalam melakukan koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza periode tahun 2023 sampai dengan 2024.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah UNOCHA. Dan objek penelitiannya adalah fungsi UNOCHA dalam melakukan koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan *(Library Research)* yaitu mengumpulkan data dan informasi dari buku, jurnal, artikel, laporan, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini (Sidiq, Choiri 2019, 157).

1.8.4 Proses Penelitian

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian yang berfokus pada data dan informasi terkait konflik genosida Israel di Gaza, dan upaya UNOCHA dalam mengkoordinasikan bantuan terhadap hal tersebut.

Kemudian, merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian serta menghubungkan kesimpulan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Selanjutnya menyusun laporan secara sistematis sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada Bab I, penulis akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II, penulis akan membahas mengenai tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Gaza, menganalisis peran UNOCHA di Gaza, dan menganalisis tantangan serta kendala yang dihadapi UNOCHA dalam mengkoordinasikan bantuan di Gaza.

Pada Bab III, penulis akan menganalisis fungsi UNOCHA dalam melakukan koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza selama periode tahun 2023 hingga 2024 menggunakan konsep fungsi organisasi internasional.

Pada Bab IV, merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Penulis akan menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan rekomendasi serta saran terkait fungsi UNOCHA dalam melakukan koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza selama periode 2023 hingga 2024.

BAB 2

ANALISIS TINDAKAN GENOSIDA, KRISIS KEMANUSIAAN DAN TANTANGAN UNOCHA DI GAZA

Pada bab 2, bagian ini akan terdiri dari tiga sub-bab, yaitu yang pertama adalah tindakan genosida Israel serta krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, peran UNOCHA di Gaza, dan kendala serta tantangan UNOCHA dalam mengkoordinasikan bantuan di Gaza

2.1. Tindakan Genosida Israel serta Krisis Kemanusiaan di Gaza

Kata "genosida" berasal dari bahasa Yunani dan Latin. Dalam bahasa Yunani, *"genos"* berarti ras, suku, atau bangsa, sedangkan *"cide"* dalam bahasa Latin berarti pembunuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), genosida didefinisikan sebagai pembunuhan massal yang direncanakan terhadap suatu bangsa atau ras tertentu. Dengan demikian, genosida dapat dipahami sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghancurkan sebagian atau seluruh anggota suatu bangsa, ras, etnis, atau kelompok tertentu lainnya (Karisha 2024, 3).

Menurut Setiyono, Joko (2020), seorang pengacara Polandia bernama Raphael Lemkin pertama kali menggunakan istilah genosida pada konferensi internasional pada tahun 1944. Dalam buku Lenkim, *Axis Rule in Occupied Europe*, dijelaskan bahwa "Genosida sebagai respon terhadap kebijakan Nazi Jerman mengenai pembunuhan orang Yahudi dalam peristiwa *Holocaust,* termasuk juga tindakan penghancuran suatu kelompok, etnis, dan agama yang

telah ditargetkan sebelumnya, seperti penghancuran *Carthage* atas kelompok-kelompok agama dalam perang Islam dan perang Salib, pembantaian orang-orang Albigense."

Genosida adalah tindak kejahatan global yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Genosida, menurut hukum internasional, merupakan salah satu tindakan yang dianggap paling berbahaya yang mengancam eksistensi umat manusia. Hukuman kebiasaan internasional telah menetapkan bahwa kejahatan genosida berlaku untuk semua negara, tanpa membedakan asal-usul mereka. *"The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide"* tahun 1948 menetapkan dasar untuk kejahatan genosida (Karisha 2024, 31-32).

Tindakan genosida terdiri dari komponen mental dan fisik. Genosida didefinisikan dalam kelompok elemen mental sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Dalam kelompok elemen fisik, genosida terdiri dari lima tindakan, yaitu pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan kerusakan fisik dan mental anggota kelompok, dan sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang hancur (Karisha 2024, 4-5).

Pernyataan tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menyebutkan bahwa "suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai genosida jika ada niat untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Ini termasuk tindakan membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, menciptakan kondisi kehidupan yang berpotensi

mengakibatkan kemusnahan fisik, memaksakan pencegahan kelahiran dalam kelompok, serta memindahkan anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya."

Pandangan yang menyatakan bahwa Israel terlibat dalam genosida terhadap Palestina umumnya merinci beberapa tindakan dan kebijakan yang dianggap merugikan dan bahkan menghancurkan kelompok Palestina. Salah satu aspek utama adalah penggunaan kekuatan militer, di mana serangan militer Israel terhadap wilayah Palestina, terutama selama konflik bersenjata, menyebabkan banyak korban sipil dan kerusakan infrastruktur. Hal ini sering kali dianggap sebagai tindakan genosida (Karisha, 2024).

Serangan Israel di Jalur Gaza ditujukan untuk melemahkan kekuatan Hamas, yang dianggap teroris setelah melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran ini mencakup serangan terhadap penduduk sipil, target sipil, fasilitas umum, penggunaan senjata terlarang, dan serangan udara yang tidak proporsional. Akibat serangan tersebut, lebih dari 1.500 anak-anak dan wanita kehilangan nyawa, sementara 5.000 penduduk sipil mengalami cedera dan cacat (Karisha, 2024).

Perang antara Israel dan Hamas telah mengakibatkan bencana kemanusiaan di Gaza. Meskipun sudah lebih dari satu bulan berlalu, serangan udara dan tembakan roket masih terus berlangsung, menyebabkan ribuan korban jiwa dan merusak sebagian besar permukiman di wilayah tersebut. Akibatnya, 1,5 juta warga Gaza kehilangan tempat tinggal dan terpaksa tinggal berdesak-desakan di kamp pengungsian (Azzahra et al. 2024).

Pertempuran ini telah menimbulkan jumlah korban jiwa yang tinggi di kalangan masyarakat sipil Gaza, dengan lebih dari 10.000 orang tewas hingga 7 November 2023, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Di pihak Israel, korban jiwa mencapai sekitar 1.400, termasuk 31 anak-anak. Israel mengklaim bahwa tindakan militer mereka adalah bentuk bela diri terhadap serangan Hamas dan upaya membalas kematian warga Israel serta membebaskan tawanan. Namun, beberapa pihak mulai menuduh tindakan Israel sebagai agresi militer yang berpotensi menjadi genosida terhadap warga Palestina. Serangan terhadap warga sipil Gaza dianggap oleh beberapa ahli sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Azzahra et al. 2024).

Insiden penyerangan oleh Hamas pada Sabtu, 7 Oktober 2023, mengakibatkan konflik yang tidak terhindarkan, dengan banyak pelanggaran HAM terjadi. Pada hari ke-34, jumlah kematian penduduk Palestina di Jalur Gaza meningkat. Dilaporkan, sudah ada 10.569 korban tewas di Gaza, termasuk 4.324 anak di bawah umur dan 2.823 wanita dewasa. Sementara itu, jumlah orang yang mengalami luka-luka mencapai 26.475, di mana 8.663 di antaranya adalah anak-anak dan 6.327 wanita dewasa (Priambada, 2023).

Selain itu, dalam peperangan melawan Palestina, Israel mengabaikan hak warga sipil yang disebut hak mutlak atau *Non-Derogable Rights*. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, terdapat juga pertanggungjawaban negara terkait hak asasi manusia. Pertama, negara wajib memastikan bahwa tidak melakukan tindakan langsung yang melanggar hak asasi manusia *(crime by commission)*. Kedua, negara juga harus tidak bertindak pasif dengan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia terjadi *(crime by omission)*. Namun, hal ini juga telah diabaikan

oleh Israel dalam tindakan genosida terhadap bangsa Palestina (Smith et al. 2008, 69).

Pelanggaran terhadap penduduk sipil yang dilakukan oleh pasukan Israel di jalur Gaza yaitu, penyiksaan terhadap warga sipil di dalam tahanan, selama "Operasi *Cast Lead*," penjara Israel menerapkan hukuman yang tidak manusiawi. Para tahanan ditutup matanya dan dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari, serta mengalami pelecehan dan kekerasan fisik. Mereka juga dipaksa menjalani latihan sasaran oleh tentara. Tidak ada perawatan untuk tahanan yang sakit, yang melanggar Konvensi Jenewa IV tahun 1949, khususnya Pasal 31 dan 37, yang melarang penyiksaan terhadap warga sipil yang ditahan. Pasal 31 tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, sementara Pasal 37 menjamin perlindungan kemanusiaan bagi warga sipil. Tindakan ini jelas melanggar prinsip-prinsip tersebut (Mahardika, Mangku, Yuliarti 2021, 595-597).

Selanjutnya, penembakan terhadap warga sipil, pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel terhadap Palestina dimulai pada 23 Juni 2008, ketika seorang militer Israel menembaki warga sipil Palestina yang sedang mengumpulkan kayu bakar di dekat perbatasan Beith Lahia. Menurut Pasal 6 Piagam Pengadilan Militer Internasional, para pemimpin, organisator, instigator, dan pembantu yang terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan kejahatan bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Pengadilan internasional melakukan penuntutan terhadap mereka yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional, termasuk di wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari Yugoslavia sejak tahun 1991 (Mahardika, Mangku, Yuliarti 2021, 595-597).

Pelanggaran terhadap hak anak, selama Operasi *Cast Lead*, Israel melanggar Pasal 24 dan 50 Konvensi Jenewa IV tahun 1949, yang melindungi hak-hak anak di bawah umur. Anak-anak Palestina mengalami krisis kesehatan akibat agresi Israel, dengan laporan resmi AS menyebutkan bahwa sekitar 22,5% anak-anak Palestina mengalami kekurangan gizi. Selama operasi ini, pasukan Israel membunuh 108 anak, termasuk 99 di Jalur Gaza. Pada 28 Desember 2008, pesawat militer Israel menembakkan roket ke arah warga sipil Palestina yang berkumpul di dekat Masjid Al-Ihsan, mengakibatkan sembilan orang tewas, termasuk enam anak, dan 12 lainnya terluka (Mahardika, Mangku, Yuliarti 2021, 595-597).

Tindakan ini jelas melanggar Pasal 24 Konvensi Jenewa IV, yang mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik melindungi anak-anak dalam situasi perang dan bekerja sama dengan otoritas lokal untuk memfasilitasi perawatan dan pendidikan anak-anak. Anak-anak di bawah umur harus dipandang sebagai warga sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan (Sumasa 2019, 18). Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa pasukan Israel melakukan serangan tanpa pandang bulu, dengan mayoritas korbannya adalah anak-anak.

Dengan demikian, dalam konflik Israel-Palestina, pembatasan terhadap hak asasi manusia yang tergolong sebagai hak non-derogable tidak boleh dilakukan, karena dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara yang melakukannya akan menghadapi berbagai sanksi dan kecaman sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (Sifana et al. 2024, 25).

2.2 Peran UNOCHA di Gaza

Berdasarkan dokumen resmi yang diterbitkan oleh *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA), respons kemanusiaan di Jalur Gaza pada tahun 2023–2024 menunjukkan skala intervensi yang sangat besar di tengah kondisi kemanusiaan yang memburuk akibat eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan kelompok Hamas. UNOCHA memimpin koordinasi lintas lembaga, baik antar badan PBB, organisasi internasional, maupun lembaga kemanusiaan lokal, untuk menjawab kebutuhan mendesak jutaan penduduk Gaza yang terdampak perang dan blokade berkepanjangan.

Sejak meletusnya konflik pada 7 Oktober 2023, situasi kemanusiaan di Gaza mengalami kemunduran drastis. Infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, jaringan air bersih, dan fasilitas energi mengalami kehancuran luas. Berdasarkan laporan UNOCHA hingga pertengahan tahun 2024, tercatat lebih dari 37.000 korban jiwa, sekitar 85.000 orang luka-luka, dan hampir 90% penduduk Gaza (1,9 juta jiwa) terpaksa mengungsi berulang kali akibat serangan dan perintah evakuasi (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 2024).

Dalam kondisi yang penuh keterbatasan ini, UNOCHA berfungsi mempertahankan koordinasi kemanusiaan melalui pembentukan *Joint Humanitarian Operations Center* (JHOC) yang berlokasi di Deir al Balah. Pusat operasi tersebut menjadi tempat koordinasi utama bagi berbagai lembaga kemanusiaan untuk merencanakan, menyalurkan, dan memantau bantuan darurat bagi warga Gaza. Selain itu, UNOCHA memfasilitasi keterlibatan LSM lokal Palestina dengan menyediakan sarana komunikasi dan koordinasi, sehingga

respons kemanusiaan tetap bersifat inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 2024).

Untuk membangun JHOC di tengah kondisi Gaza yang sangat kacau, UNOCHA tidak mungkin bekerja sendirian. Karena itu, sejak awal proses perencanaan, UNOCHA menggandeng sejumlah mitra yang memiliki kemampuan teknis dan operasional yang dibutuhkan agar pusat koordinasi ini benar-benar bisa berjalan. *Emergency Telecommunications Cluster* (ETC), bersama *United Nations Department of Safety and Security* (UNDSS) dan UNOCHA, mengusulkan pembentukan Joint Humanitarian Operations Centre (JHOC) di Deir al-Balah sebagai *"common operational site"* bagi para pekerja kemanusiaan (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024)

Pada 6 Mei 2024, ETC memindahkan, memasang, dan menguji sistem radio VHF dan solusi tenaga surya 24/7 di *"WFP guesthouse in Deir al Balah"* sebagai bagian dari persiapan agar JHOC bisa menyediakan saluran komunikasi aman untuk responder kemanusiaan (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024). Sejak itu, JHOC diharapkan menjadi pusat koordinasi bagi berbagai organisasi kemanusiaan (respon darurat, layanan kesehatan, distribusi bantuan, serta komunikasi), memungkinkan mereka bekerja bersama meskipun akses dan komunikasi di Gaza sangat terbatas (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Dalam sektor kesehatan, melalui *Health Cluster*, UNOCHA bersama mitra kemanusiaan berhasil menjaga agar sistem kesehatan Gaza tidak sepenuhnya kolaps. Hingga Juni 2024, tercatat lebih dari 5 juta layanan kesehatan primer telah

diberikan, didukung oleh 27 tim medis darurat, serta pendirian 8 rumah sakit lapangan. Selain itu, sebanyak 1,38 juta dosis vaksin disalurkan dan dua klinik reproduksi darurat dibuka untuk membantu ibu dan bayi baru lahir (OCHA oPt, 2024).

Selain bantuan logistik, UNOCHA menyalurkan bantuan tunai serbaguna *(Multipurpose Cash Assistance)* kepada lebih dari 87.000 rumah tangga atau sekitar 600.000 individu, menggunakan sistem dompet digital *(e-wallet)* untuk memudahkan penerima bantuan memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah kelangkaan uang tunai. UNOCHA juga meluncurkan kampanye *"SANAD Network"* sebagai bagian dari kebijakan *Protection from Sexual Exploitation and Abuse* (PSEA), yang berhasil menjangkau lebih dari 300.000 penerima manfaat melalui hotline dan program edukasi daring (UNICEF, 2024).

Dengan ini, UNOCHA tidak hanya berperan sebagai lembaga perencana strategis, tetapi juga sebagai pelaksana tanggap darurat yang adaptif. Melalui sinergi antara perencanaan jangka panjang dan tindakan langsung di lapangan, UNOCHA berupaya mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan serta memastikan keberlanjutan bantuan bagi masyarakat Gaza yang terdampak krisis berkepanjangan.

2.3 Tantangan dan Kendala UNOCHA di Gaza

Dalam menjalankan tugasnya di Gaza, UNOCHA menghadapi berbagai kendala yang membuat proses penyaluran bantuan menjadi sangat rumit. Meskipun UNOCHA memiliki mandat untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan, Gaza adalah salah satu wilayah yang

paling sulit diakses di dunia, sehingga hampir setiap langkah yang mereka ambil dipenuhi hambatan. Kendala paling besar yang dihadapi UNOCHA adalah blokade darat, laut, dan udara yang diberlakukan sejak 2007. Blokade ini membuat akses untuk memasukkan barang-barang kemanusiaan menjadi tidak menentu. Setiap truk bantuan harus melalui izin yang sangat ketat, dan tidak ada kepastian kapan pintu perbatasan akan dibuka atau ditutup. Sering kali truk yang membawa makanan, obat-obatan, dan bahan bakar harus menunggu berhari-hari di perbatasan, sementara kebutuhan masyarakat di Gaza sudah sangat mendesak. UNOCHA bisa mengajukan permintaan masuknya bantuan, tetapi keputusan akhir tetap berada pada pihak yang mengontrol perbatasan, sehingga UNOCHA sering menghadapi keterlambatan yang mereka sendiri tidak bisa kendalikan. (Human Rights Watch, 2023).

Dalam situasi seperti ini, UNOCHA tidak membawa bantuan secara langsung, tetapi berfungsi sebagai "pembuka jalan" bagi lembaga lain agar bantuan mereka bisa masuk. UNOCHA bekerja dengan cara yang jauh lebih politis dan administratif: mereka berdialog dan bernegosiasi dengan pihak yang mengontrol perbatasan, termasuk otoritas Israel, otoritas lokal Palestina, lembaga PBB lain, hingga negara donor. Tujuannya adalah mendapatkan izin agar truk bantuan, bahan bakar, dan pasokan medis bisa masuk ke Gaza tanpa tertahan terlalu lama. UNOCHA melakukan ini bukan sekali-sekali, tetapi setiap hari, karena situasi perbatasan bisa berubah sewaktu-waktu.

Selain bernegosiasi, UNOCHA mengumpulkan data lapangan untuk menjelaskan seberapa mendesaknya kondisi di Gaza. Mereka mencatat berapa rumah sakit yang berhenti beroperasi karena tidak ada listrik, berapa banyak orang

yang mengungsi, berapa liter air bersih yang tersedia per orang, berapa jumlah pasien yang menumpuk, dan berapa banyak korban yang belum bisa dievakuasi. Laporan harian dan peta kerusakan yang dibuat UNOCHA kemudian diserahkan kepada pihak yang mengontrol perbatasan sebagai bukti bahwa pembukaan akses sangat diperlukan. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan UNOCHA menjadi "amunisi diplomatik" untuk mendorong pembukaan jalur masuk bantuan (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory, 2025).

Kendala lainnya adalah keterbatasan data dan komunikasi, terutama ketika listrik padam atau jaringan telekomunikasi terputus. UNOCHA sangat bergantung pada data lapangan untuk menentukan jumlah korban, kerusakan, dan kebutuhan darurat. Namun dalam kondisi perang, komunikasi sering terputus, sehingga sulit memastikan informasi terbaru. Misalnya, ketika jaringan internet dan telepon di Gaza putus total selama beberapa jam atau hari, UNOCHA tidak dapat memantau situasi secara real-time, membuat koordinasi bantuan menjadi terhambat. (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory, 2025).

UNOCHA memimpin koordinasi antar lembaga seperti WHO, WFP, UNICEF, dan UNRWA untuk menentukan bantuan mana yang paling mendesak dan harus masuk lebih dahulu. Misalnya, jika listrik di rumah sakit padam, UNOCHA akan menempatkan bahan bakar sebagai prioritas utama. Jika air bersih habis, mereka mendahulukan pasokan air dan peralatan sanitasi. Mekanisme koordinasi ini disebut sistem klaster, di mana setiap lembaga menangani sektor tertentu, sementara UNOCHA mengoordinasikan semuanya agar tidak tumpang

tindih. Setelah prioritas ditentukan, UNOCHA mengirimkan daftar tersebut kepada pihak perbatasan untuk meminta izin masuk sesuai kebutuhan darurat. (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory, 2025)

Selain akses fisik, UNOCHA juga menghadapi kendala keamanan. Gaza adalah wilayah yang sering mengalami eskalasi konflik secara tiba-tiba. Serangan udara, bentrokan, dan kerusakan infrastruktur membuat staf kemanusiaan sulit bergerak. Ada saat-saat ketika jalan-jalan hancur, sekolah digunakan sebagai tempat pengungsian, dan rumah sakit tidak aman. UNOCHA perlu memastikan keamanan staf dan konvoi bantuan, sekaligus memastikan bantuan sampai ke warga. Dalam situasi perang, tidak ada jaminan keselamatan mutlak, sehingga UNOCHA harus terus menyesuaikan rute, waktu distribusi, dan bahkan menunda operasi jika kondisi terlalu berbahaya (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory, 2024).

Untuk memastikan bantuan yang sudah diizinkan masuk bisa tiba dengan aman, UNOCHA menjalankan *Humanitarian Notification System* sebuah sistem yang memberi pemberitahuan kepada pihak berwenang mengenai rute truk bantuan, lokasi gudang, sekolah yang digunakan sebagai tempat pengungsian, dan rumah sakit yang aktif. Sistem ini dibuat agar lokasi kemanusiaan tidak diserang, dan truk bantuan tidak terjebak dalam area pertempuran. Dengan adanya pemberitahuan resmi dari UNOCHA, konvoi bantuan memiliki perlindungan tambahan dan peluang lebih besar untuk menembus blokade dengan aman (United Nations, 2024)

UNOCHA juga menghadapi kekurangan pendanaan. Meskipun banyak negara memberikan bantuan, kebutuhan di Gaza sangat besar, sedangkan dana yang tersedia kadang tidak mencukupi untuk mendanai semua program kemanusiaan. Ketika konflik berulang, kebutuhan meningkat drastis: lebih banyak pengungsi, lebih banyak rumah sakit rusak, lebih banyak air bersih diperlukan. Tetapi pendanaan tidak selalu bertambah. Akibatnya, UNOCHA harus membuat pilihan sulit, seperti memutuskan sektor mana yang mendapatkan prioritas, dan sektor mana yang terpaksa ditunda (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory, 2024).

Kendala terakhir, adalah kendala yang terjadi di lapangan, UNOCHA juga berhadapan dengan kerusakan infrastruktur berat. Jalan rusak, jembatan terputus, jaringan air dan listrik tidak berfungsi, dan gudang bantuan bisa hancur sewaktu-waktu. Ini membuat distribusi bantuan di dalam Gaza tetap sulit, bahkan setelah bantuan berhasil masuk. Membawa bantuan dari perbatasan ke pengungsi seringkali lebih sulit dibandingkan memasukkannya. UNOCHA harus bekerja bersama lembaga lain untuk mencari jalan alternatif, menggunakan kendaraan khusus, atau memindahkan titik distribusi agar lebih aman (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory, 2024).

Secara keseluruhan, UNOCHA bekerja dalam lingkungan yang ekstrem: akses bantuan sering ditutup, keamanan tidak terjamin, jaringan komunikasi bisa hilang kapan saja, dan kebutuhan kemanusiaan jauh lebih besar daripada kapasitas yang tersedia. Ditambah lagi, dinamika politik dan aturan blokade membuat setiap langkah menjadi rumit. Karena itu, meskipun UNOCHA memiliki peran penting

dalam memastikan bantuan tetap mengalir, mereka bekerja dalam kondisi yang penuh hambatan struktural dan operasional yang belum tentu bisa mereka atasi sepenuhnya.

BAB 3

IMPLEMENTASI KONSEP FUNGSI ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP UPAYA UNOCHA DALAM MERESPON KONFLIK ISRAEL-PALESTINA (2023-2024)

Bagian ini akan menjelaskan terkait pengaplikasian konsep fungsi organisasi internasional terhadap fungsi UNOCHA dalam merespon konflik genosida Israel dan Palestina di tahun 2023 sampai 2024. Pemaparan bagian ini akan terdiri dari lima sub-bab, yaitu yang pertama adalah *articulation and aggregation of interests,* kedua *rule application,* ketiga *socialization,* keempat *operations activities,* dan yang kelima *information.*

3.1. *Articulation and Aggregation*

Dalam bukunya, Clive Archer menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama organisasi internasional adalah *"articulating and aggregating the views and needs of members"* yaitu mengumpulkan berbagai kepentingan dari aktor yang berbeda, lalu menyatukannya menjadi satu suara atau satu agenda bersama. Fungsi ini membuat organisasi internasional bertindak sebagai "ruang berkumpul" bagi aktor-aktor yang memiliki tujuan sama tetapi kebutuhan yang berbeda-beda (Archer, 2001).

Di Gaza, fungsi itu tercermin sangat jelas dalam cara UNOCHA bekerja. Gaza adalah wilayah yang dipenuhi puluhan lembaga kemanusiaan internasional, ratusan NGO lokal Palestina, badan-badan PBB seperti UNRWA, WFP, WHO,

UNICEF, serta lembaga donor. Masing-masing membawa kepentingan dan prioritas yang berbeda, ada yang fokus pangan, ada yang fokus air bersih, ada yang fokus perlindungan perempuan dan anak, ada yang fokus layanan kesehatan. Tanpa ruang koordinasi, semua aktor ini bisa bekerja secara tumpang-tindih atau malah tidak menjangkau kelompok paling rentan.

UNOCHA mengisi ruang kosong itu. Melalui forum-forum formal seperti *Humanitarian Country Team* (HCT), *Cluster System*, *Inter-Cluster Coordination Group* (ICCG), serta pusat operasi bersama seperti *Joint Humanitarian Operations Center* (JHOC), UNOCHA mengumpulkan data, keluhan, kebutuhan, prioritas, serta tuntutan dari berbagai aktor, lalu merangkumnya menjadi satu rencana respons kemanusiaan *(Humanitarian Response Plan)*.

Dalam HRP umum (termasuk HRP di Gaza), Anda akan menemukan bagian-bagian seperti:

- **Analisis kebutuhan dan situasi kemanusiaan**: data tentang berapa banyak orang terdampak, kondisi layanan dasar (kesehatan, air dan sanitasi, *shelter*), tingkat pengungsian, kerusakan infrastruktur, aksesibilitas, dan kerentanan penduduk.
- **Prioritas intervensi**: sektor apa saja yang paling mendesak misalnya air & sanitasi (WASH), kesehatan, pangan, perlindungan *(protection), shelter* dan *non-food items* (NFI), pendidikan, logistik.
- **Target populasi dan cakupan**: berapa banyak rumah tangga atau individu yang akan dibantu, berdasarkan kriteria kerentanan, lokasi, status sosial.
- **Jenis bantuan dan program intervensi**: bisa berupa distribusi makanan, air bersih, obat-obatan, perbaikan *shelter,* layanan kesehatan darurat,

pendirian fasilitas darurat, *multipurpose cash assistance,* perlindungan bagi pengungsi, dukungan psikososial, akses pendidikan darurat, dan lain sebagainya.

- **Koordinasi dan pembagian peran**: siapa lembaga yang bertanggung jawab di tiap sektor (contoh: WHO di kesehatan, WASH unit untuk sanitasi, NGO lokal untuk distribusi, dan lain sebagainya), serta mekanisme kerja sama antar lembaga (klaster, *pool resources*, logistik bersama).
- **Sumber daya dan pembiayaan**: estimasi dana yang dibutuhkan, sumber dana (donor, lembaga internasional, dana darurat), serta rencana distribusi dana.
- **Mekanisme monitoring dan evaluasi**: bagaimana hasil bantuan dipantau, pelaporan, indikator keberhasilan, dan rencana tindak lanjut.

Bagian-bagian inilah yang membuat HRP tidak hanya dokumen "rencana" tapi juga "kontrak moral dan operasional" antar semua aktor kemanusiaan agar respons jadi terstruktur, bertanggung jawab, dan efektif. HRP bukan hasil kerja UNOCHA saja dokumen ini menggabungkan input dari banyak pihak. Proses penyusunannya mencerminkan fungsi *"articulation and aggregation of interests"* seperti yang dijelaskan oleh Clive Archer:

- Dari **badan PBB**: mereka menyampaikan data dan kebutuhan dari sektor mereka masing-masing (kesehatan, pendidikan, pengungsi, pangan, dsb).

- Dari **NGO internasional dan lokal**: mereka memberi gambaran kondisi di lapangan komunitas lokal sering lebih tahu situasi di lapangan, jumlah kerentanan, kebutuhan spesifik.
- Dari **komunitas lokal dan penerima manfaat**: melalui survei kebutuhan, konsultasi komunitas, permintaan bantuan spesifik sehingga rencana tidak hanya *top-down.*
- Dari **negara donor**: mereka memberi masukan terkait kapasitas pendanaan, syarat bantuan, serta komitmen dukungan finansial.

Semua masukan itu dikumpulkan melalui forum koordinasi *(cluster meeting, HCT, inter-cluster meeting),* lalu diolah oleh UNOCHA menjadi satu dokumen HRP yang kemudian disepakati bersama. Artinya, HRP adalah hasil akhir dari agregasi kepentingan, kebutuhan, dan kapasitas dari berbagai aktor. Karena itu HRP bisa disebut "agenda bersama" untuk respons kemanusiaan tidak hanya prioritas sebuah lembaga, tetapi konsensus antar banyak pemangku kepentingan.

OCHA sendiri menegaskan bahwa tugas intinya adalah *"coordinating the global emergency response to ensure people in crises receive assistance and protection"* yang secara praktis berarti OCHA harus mendengarkan semua aktor, menggabungkan kepentingannya, dan menyuarakannya secara bersama (OCHA, 2018). Dalam konteks Gaza, forum inilah yang membuat suara organisasi lokal Palestina yang sering terpinggirkan tetap terdengar dalam keputusan besar seperti penentuan lokasi distribusi bantuan, prioritas sektor, atau akses kemanusiaan. Laporan OCHA juga menegaskan bahwa berbagai *cluster* (kesehatan, pangan, air-sanitasi, pendidikan, perlindungan) berada di bawah koordinasinya untuk

memastikan setiap lembaga menyampaikan kebutuhannya dan agar tidak ada duplikasi ketika bantuan disalurkan (OCHA, 2023).

Pada awal 2024, UNOCHA juga membentuk *Joint Humanitarian Operations Center* (JHOC) yang berlokasi di Deir al Balah. untuk mengatasi hancurnya sistem koordinasi akibat perang 2023. JHOC berfungsi sebagai tempat berkumpulnya NGO internasional, NGO lokal Palestina, badan PBB, serta lembaga donor untuk berbagi informasi dan menyamakan rencana operasi. UNOCHA menjelaskan bahwa JHOC dibangun agar koordinasi lintas-lembaga tetap berjalan meski komunikasi sering terputus.untuk mengatasi hancurnya sistem koordinasi akibat perang 2023. JHOC berfungsi sebagai tempat berkumpulnya NGO internasional, NGO lokal Palestina, badan PBB, serta lembaga donor untuk berbagi informasi dan menyamakan rencana operasi. UNOCHA menjelaskan bahwa JHOC dibangun agar koordinasi lintas-lembaga tetap berjalan meski komunikasi sering terputus (OCHA, 2025).

Dengan ini, UNOCHA tidak hanya "mengumpulkan" kepentingan aktor, tetapi juga mengagregasikan semuanya menjadi satu platform aksi bersama. Inilah yang membuat OCHA menjalankan secara nyata konsep Clive Archer, setiap aktor dapat menyampaikan kebutuhan dan kepentingannya, sementara UNOCHA menyatukan semua masukan itu menjadi strategi kemanusiaan yang utuh dan mewakili kebutuhan populasi Gaza secara keseluruhan.

3.2 *Rule Application*

Fungsi kedua dari organisasi internasional menurut Clive Archer adalah penerapan aturan *(rule application)*. Fungsi ini menjelaskan bagaimana organisasi

internasional berperan dalam menegakkan dan memastikan pelaksanaan aturan-aturan yang telah disepakati di tingkat internasional, baik berupa hukum, norma, maupun standar kemanusiaan. Dalam konteks kemanusiaan, aturan yang dimaksud umumnya berasal dari Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*/IHL), yaitu seperangkat ketentuan yang mengatur perilaku dalam konflik bersenjata agar melindungi mereka yang tidak terlibat langsung, seperti warga sipil dan tenaga medis (Archer, 2001).

Dalam situasi konflik di Gaza tahun 2023–2024, UNOCHA menjalankan fungsi *rule application* dengan memastikan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik mematuhi prinsip-prinsip dasar kemanusiaan internasional. Salah satu bentuk nyata penerapan fungsi ini terlihat dalam laporan UNOCHA berjudul *"Hostilities in the Gaza Strip and Israel Flash Update"* (rilis April 2024). Dalam laporan tersebut, UNOCHA menegaskan bahwa setiap pihak berkonflik memiliki kewajiban hukum untuk melindungi warga sipil, memberikan akses bagi lembaga kemanusiaan, dan tidak menyerang fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, serta tempat penampungan pengungsi.

Melalui laporan dan seruannya, UNOCHA mendorong penerapan prinsip-prinsip IHL di lapangan, terutama mengenai:

1. Prinsip perlindungan terhadap warga sipil, agar mereka tidak menjadi target kekerasan;
2. Prinsip akses kemanusiaan tanpa hambatan, yang menjamin lembaga bantuan dapat menyalurkan makanan, obat-obatan, dan layanan medis dengan aman;

3. Prinsip proporsionalitas dan perbedaan (*distinction and proportionality*), yang menekankan bahwa serangan harus membedakan antara target militer dan sipil.

Selain itu, UNOCHA juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti WHO, UNRWA, dan ICRC untuk memantau pelanggaran hukum humaniter internasional dan melaporkannya kepada Dewan Keamanan PBB serta masyarakat internasional. Tindakan ini menunjukkan bahwa UNOCHA tidak hanya sebagai koordinator bantuan, tetapi juga sebagai penegak moral dan hukum kemanusiaan di tengah konflik ("UNOCHA Flash Update on Gaza Crisis" 2024).

3.3 *Socialization*

Menurut Clive Archer, organisasi internasional bukan hanya tempat bagi negara atau lembaga bekerja sama secara teknis, melainkan juga menjadi ruang di mana aktor-aktor internasional *belajar* bagaimana mereka "seharusnya" berperilaku sesuai standar yang berlaku di komunitas internasional. Archer menyatakan bahwa organisasi internasional dapat *"socialize states to new patterns of behaviour"*, yaitu memperkenalkan pola tindakan, cara berpikir, dan nilai-nilai tertentu kepada para anggota sehingga mereka menyesuaikan perilakunya dengan praktik yang diterima secara global (Archer, 2001).

Dalam proses ini, organisasi internasional tidak selalu bertindak sebagai "guru" dalam arti formal, tetapi lebih sebagai lingkungan yang membentuk kebiasaan dan pola interaksi. Melalui rapat, standar operasional, panduan teknis, dan mekanisme koordinasi, para anggota lambat laun menyerap nilai dan norma internasional. Itulah mengapa Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional

dapat mempengaruhi cara kerja, standar perilaku, dan pola tindakan aktor-aktor yang terlibat, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit sebagai agenda "penanaman nilai" (Archer, 2001).

Dalam konteks Gaza, fungsi sosialisasi ini terlihat sangat jelas dalam cara UNOCHA bekerja. Setiap hari, berbagai lembaga kemanusiaan mulai dari badan PBB seperti UNICEF dan WHO, hingga LSM internasional dan organisasi lokal Palestina berkumpul dalam forum koordinasi yang difasilitasi UNOCHA. Di forum-forum inilah UNOCHA memperkenalkan dan menegaskan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi bagian dari standar internasional, seperti prinsip *humanity* (tindakan harus berfokus pada penyelamatan manusia), *neutrality* (tidak memihak dalam konflik), *impartiality* (bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan identitas), dan *independence* (aksi kemanusiaan harus bebas dari kepentingan politik). Keempat nilai ini merupakan *"Humanitarian Principles"* yang telah lama menjadi dasar kerja PBB dan selalu ditekankan dalam setiap operasi kemanusiaan (OCHA, 2024).

Melalui rapat koordinasi seperti *Cluster Meetings, Humanitarian Country Team* (HCT), dan *Inter-Cluster Coordination Group* (ICCG), UNOCHA tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membiasakan semua organisasi untuk mengikuti prinsip-prinsip tersebut dalam praktik. Misalnya, organisasi diwajibkan menyusun laporan kebutuhan berdasarkan standar yang sama, menggunakan format asesmen yang sama, dan memastikan bahwa bantuan disalurkan sesuai prioritas kerentanan, bukan preferensi lembaga. Dengan proses seperti ini, aktor-aktor yang terlibat belajar bagaimana bantuan kemanusiaan seharusnya disalurkan di bawah prinsip-prinsip internasional.

Selain itu, UNOCHA juga mensosialisasikan norma teknis dan operasional misalnya penggunaan sistem klaster, standar pelaporan situasi *(situation report),* protokol keamanan staf kemanusiaan, mekanisme akses bantuan, dan cara melakukan koordinasi dengan otoritas lokal. Semua ini adalah bagian dari standar internasional yang disusun melalui kerangka kerja kemanusiaan global. UNOCHA menekankan bahwa setiap organisasi harus mengikuti struktur klaster untuk menghindari tumpang tindih, memastikan koordinasi berjalan lancar, dan menjaga kualitas bantuan (OCHA, 2024).

Norma lain yang juga disosialisasikan UNOCHA adalah prinsip perlindungan sipil dan kewajiban mematuhi hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law/IHL*). Melalui laporan, advokasi, dan dialog dengan pihak berwenang, UNOCHA menekankan pentingnya melindungi warga sipil, membuka akses kemanusiaan yang aman, dan menghormati fasilitas publik seperti rumah sakit dan sekolah. Setiap organisasi kemanusiaan yang bekerja di Gaza dituntut untuk menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman, baik dalam perencanaan maupun implementasi program (OCHA, 2024).

Fungsi sosialisasi UNOCHA tidak ditujukan kepada Israel, melainkan terutama kepada komunitas kemanusiaan yang bekerja di Gaza mulai dari badan PBB, lembaga internasional, hingga organisasi lokal Palestina. Melalui mekanisme koordinasi, sistem klaster, dan penyusunan standar operasional, para aktor inilah yang dibentuk untuk bekerja sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan global. Sementara otoritas Palestina dapat terpengaruh secara tidak langsung melalui proses koordinasi lapangan, Israel bukan menjadi sasaran sosialisasi melainkan objek advokasi terkait akses kemanusiaan.

Dengan demikian, fungsi *socialization* dari Clive Archer tidak hanya bersifat konseptual, tetapi benar-benar tampak dalam praktik kerja UNOCHA. Melalui koordinasi harian, penyusunan standar, penyebaran nilai kemanusiaan, dan penciptaan budaya kerja kolektif, UNOCHA membentuk cara organisasi lain bertindak di Gaza membiasakan mereka bekerja secara netral, imparsial, berbasis kebutuhan, terkoordinasi, dan berlandaskan nilai perlindungan sipil. Inilah yang dimaksud Archer ketika menyatakan bahwa organisasi internasional mampu membentuk pola perilaku dan nilai aktor-aktornya hingga sejalan dengan standar internasional.

3.4 *Operations Activities*

Fungsi *operational activities* menurut Clive Archer menggambarkan peran organisasi internasional dalam melaksanakan tindakan nyata di lapangan untuk mencapai tujuan dan mandat kemanusiaannya. Fungsi ini menegaskan bahwa organisasi internasional tidak hanya berperan dalam membuat kebijakan atau mengatur koordinasi antar lembaga, tetapi juga bertindak langsung melalui berbagai kegiatan operasional yang memberikan dampak konkret bagi masyarakat yang membutuhkan (Archer, 2001).

Dalam konteks bantuan kemanusiaan di Gaza pada tahun 2023-2024, fungsi ini dijalankan secara jelas oleh UNOCHA, contoh nyata yaitu pada bidang kesehatan menurut laporan dari website resmi OCHA, per tanggal 23 juli layanan kesehatan di Gaza ditopang oleh 49 organisasi dalam Klaster Kesehatan yang bersama-sama berhasil memberikan bantuan kepada sekitar 350.000 warga di seluruh wilayah. Untuk memperkuat tenaga medis lokal yang kewalahan,

sebanyak 13 Tim Medis Darurat *(Emergency Medical Teams/EMT)* telah ditempatkan termasuk satu tim yang beroperasi di Gaza utara dan berbagai langkah terus dilakukan untuk menambah kapasitas tempat tidur rumah sakit yang semakin terbatas (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Pada saat yang sama, temuan Virus Polio yang Berasal dari Vaksin (VDPV) Tipe 2 dari sampel lingkungan di Deir al-Balah dan Khan Younis mendorong Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bekerja lebih dekat dengan Kementerian Kesehatan Gaza. WHO segera mengirim para ahli polio untuk melakukan penilaian teknis dan membantu merancang langkah penanggulangan yang tepat. Selain itu, Klaster Kesehatan juga membentuk kelompok kerja khusus untuk evakuasi medis, yang bertugas merancang sistem evakuasi pasien yang lebih terstruktur, aman, dan dapat diandalkan di tengah kondisi konflik yang terus berubah (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Kemudian untuk bagian nutrisi, upaya penanggulangan malnutrisi di Gaza terus dilakukan oleh para mitra kemanusiaan melalui skrining Lingkar Lengan Atas (LILA) di berbagai tempat penampungan dan fasilitas kesehatan. Sejak pertengahan Januari, sudah ada 169.101 anak usia 6-59 bulan serta 10.355 ibu hamil dan menyusui yang diperiksa status gizinya. Dari jumlah tersebut, 11.541 anak teridentifikasi mengalami malnutrisi akut, terdiri dari 8.993 kasus Malnutrisi Akut Sedang (MAM) dan 2.548 kasus Malnutrisi Akut Berat (SAM). Seluruh anak yang terdeteksi telah mendapatkan perawatan sesuai protokol yang disederhanakan, dan 271 ibu hamil/menyusui juga telah masuk dalam program

penanganan gizi. Untuk mendukung layanan gizi, hingga 20 Juli, tersedia 307 titik layanan makanan tambahan dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) di 296 lokasi. Selain itu, sejak pertengahan Juli, hampir 100 metrik ton Suplemen Nutrisi Berbasis Lipid (LNS-MQ) telah berhasil masuk ke Gaza, sehingga program Bantuan Makanan Tambahan Umum (BSFP) dapat kembali diperluas (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Di bulan yang sama, dalam rangka kampanye "Temukan dan Tangani", sebanyak 624 relawan menerima pelatihan terkait skrining, Manajemen Malnutrisi Akut Berbasis Masyarakat (CMAM), serta praktik pemberian makan yang tepat bagi bayi dan anak. Secara keseluruhan, hingga saat ini sudah 438 tenaga kesehatan yang dilatih CMAM, termasuk 22 tenaga yang menerima pelatihan antara 8–21 Juli, dan 838 kader kesehatan masyarakat juga telah dibekali kemampuan untuk menemukan dan merujuk kasus malnutrisi akut (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Untuk meningkatkan kualitas respons, Kelompok Kerja Teknis Malnutrisi Akut juga mengembangkan alat dan pedoman baru agar mitra dapat mendeteksi dan menangani kasus malnutrisi pada bayi di bawah enam bulan dengan lebih akurat. Sementara itu, Gugus Tugas tetap melakukan survei cepat, terutama di Khan Younis dan Deir al-Balah, untuk memantau distribusi pengganti asi seperti susu formula yang meningkat dan dikhawatirkan dapat memperburuk kesehatan bayi mengingat kondisi air dan sanitasi yang terus memburuk (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Di bidang ketahanan pangan, hingga 20 Juli, sebanyak 13 dari 18 toko roti yang didukung mitra kemanusiaan kembali beroperasi di Jalur Gaza. Lokasinya tersebar di Gaza City (4 toko), Gaza Utara (2 toko), serta Deir al-Balah (7 toko). Namun dua toko roti di Gaza City sempat berhenti beroperasi antara 8–19 Juli karena pertempuran dan kekurangan bahan bakar. Sementara itu, lima toko roti di Rafah tetap tutup karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan. Selama bulan Juli, para mitra dari *Food Security Sector* (FSS) setiap hari menyediakan sekitar 630.000 porsi makanan siap saji dari 180 dapur umum di seluruh Gaza. Distribusinya mencakup sekitar 20.000 porsi di Gaza Utara, serta 610.000 porsi di wilayah tengah dan selatan Gaza. Selain penyediaan makanan, FSS bekerja sama dengan Cluster Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH) untuk memastikan setiap dapur umum memiliki akses ke air minum yang aman, sehingga makanan yang disajikan tetap higienis (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Sejak 8 Juli, mitra FSS juga menyalurkan makanan siap saji, buah segar, dan biskuit berenergi tinggi kepada para pengungsi yang bergerak dari Gaza Utara, Tengah, dan Selatan. Penyaluran ini dilakukan sebagai bagian dari respons multisektoral di titik-titik penerimaan pengungsi. FSS turut berkoordinasi dengan perwakilan komunitas dan *Site Management Working Group* (SMWG) untuk mengidentifikasi keluarga yang sudah berkali-kali berpindah tempat, agar mereka tidak terlewat dalam program bantuan pangan (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Selain bantuan makanan untuk penduduk umum, pada paruh pertama bulan Juli, para mitra mendistribusikan sekitar 36 metrik ton pakan ternak untuk

lebih dari 350 keluarga peternak di Gaza Tengah dan Selatan. Bantuan pakan ini penting untuk menjaga keberlangsungan produksi daging dan susu lokal, yang sangat dibutuhkan untuk memastikan anak-anak Gaza tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Lanjut untuk bagian air, sanitasi, dan kebersihan (WASH), Dalam rentang 8 hingga 21 Juli, *Coastal Municipalities Water Utility* (CMWU) bersama *Palestinian Water Authority* (PWA) melaporkan bahwa pasokan air minum dan air rumah tangga yang aman di seluruh Jalur Gaza hanya mencapai sekitar 90.000 meter kubik per hari sekitar 25% dari jumlah pasokan air sebelum perang. Salah satu sumber penting, yaitu pipa air Al Muntar yang mengalir dari Israel ke Gaza Utara, sempat berhenti sepenuhnya sejak 1 Juli, tetapi kembali berfungsi pada 20 Juli setelah menjalani perbaikan untuk mengatasi kebocoran dan kerusakan. Di Gaza Utara sendiri, UNRWA sedang memperbaiki dua sumur air tambahan yang, jika berfungsi penuh, dapat memasok sekitar 200 meter kubik air per hari. Saat ini hanya empat dari tujuh sumur air milik UNRWA yang masih bekerja, dengan total produksi sekitar 3.800 meter kubik per hari (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Selama periode ini, adanya sedikit peningkatan pasokan bahan bakar memungkinkan sebagian dari stok tersebut dialihkan untuk mengoperasikan fasilitas pembuangan limbah. Prioritasnya adalah mencegah banjir limbah dan mengurangi risiko kontaminasi di area pemukiman. Di Khan Younis, tahap pertama rehabilitasi sistem pembuangan limbah sudah selesai. Enam stasiun pompa berhasil diperbaiki, sementara tahap selanjutnya yang berfokus pada

perbaikan jaringan pembuangan di sekitar stasiun-stasiun tersebut masih berlangsung. Secara keseluruhan, sekitar 76 km jaringan pembuangan dilaporkan rusak atau tersumbat, dan sekitar 2 km telah masuk dalam proses perbaikan. UNICEF dan CMWU juga sedang memperbaiki dua stasiun pompa tambahan di bagian barat Khan Younis yang mengalami kerusakan sebagian. Sementara itu, di Deir al-Balah, Klaster WASH bekerja sama dengan CMWU untuk memperbaiki jaringan air dan sistem pembuangan limbah di wilayah Az Zawaida serta Kamp Pengungsi Al-Maghazi. UNICEF dan CMWU juga menangani pembersihan sumbatan pada saluran pembuangan yang membahayakan lingkungan dan akses sanitasi warga di daerah tersebut (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Selanjutnya bantuan seperti tempat berlindung dan barang non-pangan (NFI), Pada periode 8 hingga 21 Juli, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya, para mitra dalam Shelter Cluster berhasil menyalurkan bantuan barang non-pangan (NFI) kepada sekitar 950 keluarga yang mengungsi di Gaza Utara setelah dikeluarkannya perintah evakuasi oleh militer Israel. Di wilayah yang sama, para mitra juga mendirikan 200 tenda untuk menampung pengungsi baru di daerah Beit Lahya, dan persiapan untuk pengiriman tambahan bantuan tempat tinggal maupun perlengkapan dasar masih terus dilakukan (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Di Deir al-Balah, organisasi-organisasi lokal turut memberikan dukungan berupa bahan-bahan tempat tinggal dan bantuan non-pangan kepada sekitar 100 keluarga yang baru tiba setelah mengungsi dari Gaza Utara. Sementara itu, Shelter Cluster tetap melakukan pemantauan terhadap arah pergerakan pengungsi internal

dan kebutuhan mereka, khususnya di wilayah Deir al-Balah dan Khan Younis. Ketika memungkinkan, mereka juga menyediakan dukungan tempat tinggal tambahan, seperti tenda, paket NFI, dan perlengkapan untuk memperbaiki atau menyegel tempat tinggal darurat yang sudah ada (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Di bidang pendidikan, selama periode pelaporan, ada sembilan inisiatif pendidikan berbasis komunitas baru yang mulai berjalan di Gaza Utara, Gaza City, dan Deir al-Balah. Dengan tambahan ini, sejak Oktober 2023 jumlah total inisiatif pendidikan komunitas yang dibentuk mencapai 68 program. Klaster Pendidikan kemudian menghubungkan 35 dari inisiatif tersebut dengan para mitra yang bisa membantu memperluas layanan, sehingga anak-anak dapat memperoleh lebih banyak dukungan belajar. Selain itu, mitra pendidikan juga mendirikan 14 Ruang Belajar Sementara *(Temporary Learning Spaces/TLS)* baru. Ruang belajar ini dibuat untuk memberikan kesempatan belajar informal bagi anak-anak sekolah yang sudah kehilangan akses ke pendidikan formal sejak konflik dimulai pada Oktober 2023 (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Secara keseluruhan, sejak Oktober 2023 terdapat 32 organisasi mitra yang sudah memberikan dukungan kepada lebih dari 350.059 siswa dan guru. Bentuk bantuannya meliputi dukungan psikososial (PSS), program pembelajaran darurat, pemberian perlengkapan sekolah dan aktivitas rekreasi, serta sesi peningkatan kesadaran untuk membantu anak-anak menghadapi dampak psikologis konflik (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Untuk bantuan tunai serbaguna (MPCA), pada periode 8 hingga 21 Juli, lebih dari 11.127 keluarga di Gaza menerima bantuan tunai *multipurpose cash assistance* (MPCA) dalam bentuk pembayaran awal maupun tambahan, khususnya untuk kelompok yang paling rentan seperti penyandang disabilitas dan ibu menyusui. Jika dihitung sejak 7 Oktober 2023 hingga 21 Juli 2024, total 197.407 rumah tangga—setara dengan sekitar 1,36 juta orang telah menerima sedikitnya satu kali pembayaran MPCA. Besaran bantuan per rumah tangga saat ini adalah 1.000 shekel Israel (sekitar US$275). Dari jumlah tersebut, 145.913 rumah tangga atau hampir 1 juta individu sudah berhasil mencairkan bantuan yang mereka terima. Proses pencairan masih terkonsentrasi di wilayah selatan Wadi Gaza, karena akses di wilayah utara dan tengah lebih terganggu oleh situasi keamanan dan infrastruktur yang rusak (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Penggunaan dompet elektronik *(e-wallet)* untuk transaksi dan pembelian semakin meluas di kalangan lembaga kemanusiaan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan uang tunai fisik. Hasil survei *Post-Distribution Monitoring* (PDM) pertama yang menilai penggunaan *e-wallet* menunjukkan bahwa tingkat penukaran atau penggunaan bantuan mencapai 80%, menandakan mekanisme ini cukup efektif. Selain itu, *Cash Working Group* (CWG) telah menyusun sebuah kajian mengenai penggunaan uang seluler dan e-wallet dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Untuk bantuan Telekomunikasi Darurat (ETC), pada 10 Juli, tim ETC ikut serta dalam penilaian lintas-lembaga di Kamp Pengungsi Al-Bureij dan

Al-Maghazi di wilayah Deir al-Balah. Penilaian ini dilakukan untuk melihat apa saja kebutuhan mendesak terkait telekomunikasi, akses internet, dan sumber listrik bagi para pengungsi. Dalam operasi sehari-hari, ETC bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahan bakar dan peralatan teknis tetap tersedia, sehingga jaringan telekomunikasi yang tersisa dapat terus berfungsi di tengah kondisi darurat (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Selama periode pelaporan, ETC juga mengkoordinasikan proses awal impor 33 perangkat *Track*-24, yaitu alat pelacak berbasis satelit yang digunakan untuk memantau pergerakan staf kemanusiaan. Perangkat ini diperuntukkan bagi lima badan PBB yang bekerja di Gaza. Selain itu, ETC masih melanjutkan proses koordinasi untuk mendatangkan 65 perangkat tambahan yang masih menunggu persetujuan. Klaster ETC juga terus mendorong perlunya penambahan perangkat TIK dan peralatan telekomunikasi ke dalam Gaza, agar jaringan komunikasi bersama dapat diperbaiki dan diperkuat, terutama untuk mendukung keselamatan staf kemanusiaan dan menjaga kelancaran operasi bantuan (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Terakhir adalah Klaster Logistik, hingga 21 Juli, Klaster Logistik telah mengelola dan menyatukan sekitar 14.361 meter kubik kargo bantuan kemanusiaan di gudang bersama di Amman, Yordania. Gudang dengan luas 5.000 meter persegi ini berfungsi sebagai pusat utama untuk mendukung pengiriman bantuan para mitra kemanusiaan melalui Koridor Yordania, yang menjadi salah satu jalur penting masuknya bantuan ke Gaza. Dalam periode 8 hingga 21 Juli, sebanyak enam konvoi langsung berhasil diberangkatkan melalui koridor tersebut,

membawa total 139 truk berisi bantuan makanan, perlengkapan tempat tinggal, dan kebutuhan sektor WASH. Jika dihitung sejak November 2023, Klaster Logistik telah memfasilitasi 70 konvoi kemanusiaan, dengan 1.713 truk yang mengangkut sekitar 23.371 meter kubik bantuan atas nama 22 organisasi berbeda. Seluruh data dan perkembangan konvoi ini dapat diakses melalui dasbor interaktif yang disediakan untuk publik dan mitra kemanusiaan. Di dalam Gaza sendiri, layanan penyimpanan bantuan tetap tersedia melalui gudang di Deir al-Balah, yang memiliki kapasitas 1.700 meter persegi. Tim Klaster Logistik terus bekerja bersama para mitra untuk memusatkan proses pemuatan barang dari satu titik, agar penanganan dan distribusi bantuan bisa dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan terkoordinasi (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024).

Dengan ini, peran UNOCHA dalam menjalankan kegiatan operasionalnya di Gaza membuktikan pentingnya keberadaan organisasi internasional dalam menciptakan sistem kemanusiaan yang terkoordinasi dan responsif. Melalui tindakan nyata di lapangan, UNOCHA memastikan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan konkret yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terdampak konflik.

3.5 *Information*

Fungsi informasi *(information)* menurut Clive Archer menjelaskan bagaimana organisasi internasional berperan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data atau laporan yang akurat kepada masyarakat internasional.

Melalui fungsi ini, organisasi internasional menjadi sumber utama dalam menyediakan gambaran faktual mengenai situasi di lapangan, yang kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh negara-negara anggota, lembaga donor, maupun masyarakat global (Archer, 2001).

Dalam konteks konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza tahun 2023–2024, fungsi informasi dijalankan secara nyata oleh *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA). Lembaga ini secara rutin mengumpulkan data kemanusiaan dari berbagai sumber di lapangan, termasuk lembaga mitra seperti UNRWA, WHO, WFP, serta organisasi non-pemerintah lokal yang bekerja langsung bersama masyarakat Palestina. Informasi tersebut kemudian diolah dan dipublikasikan melalui laporan situasi *(Situation Reports)* dan pembaruan cepat *(Flash Updates)* yang diterbitkan setiap minggu di situs resmi UNOCHA dan *ReliefWeb*. ("UNOCHA Gaza Situation Report" 2023).

Melalui laporan-laporan ini, UNOCHA memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi terbaru di Gaza, seperti jumlah korban sipil, tingkat kerusakan infrastruktur, ketersediaan bantuan pangan dan medis, hingga hambatan akses bagi lembaga kemanusiaan. Misalnya, dalam laporan *"Hostilities in the Gaza Strip and Israel Flash Update"* yang dirilis pada April 2024, UNOCHA menyajikan data rinci mengenai kerusakan rumah sakit, penutupan jalur bantuan di Rafah, serta kebutuhan mendesak bagi lebih dari dua juta penduduk Gaza yang terdampak.

Selain sebagai penyedia data, UNOCHA juga berperan dalam menyebarluaskan informasi tersebut kepada negara-negara donor dan badan PBB lainnya untuk mendorong dukungan internasional yang lebih besar. Informasi

yang dikumpulkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai alat advokasi untuk menekan komunitas internasional agar segera bertindak dalam merespons situasi kemanusiaan yang memburuk. Dalam hal ini, UNOCHA berperan sebagai "mata dan telinga" dunia internasional terhadap kondisi nyata di lapangan, memastikan bahwa keputusan global diambil berdasarkan fakta yang akurat, bukan opini politik ("UNOCHA Gaza Situation Report" 2023).

UNOCHA juga memanfaatkan platform digital dan media sosial seperti X (Twitter), Instagram, dan *YouTube,* untuk menyebarluaskan informasi kemanusiaan secara *real time*. Melalui unggahan visual, infografis, dan video singkat, UNOCHA mengedukasi publik tentang dampak kemanusiaan dari konflik Gaza, kebutuhan darurat warga sipil, serta pentingnya dukungan global untuk penghentian kekerasan. Melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan publikasi yang konsisten, UNOCHA memperlihatkan bagaimana fungsi informasi menjadi inti dari koordinasi kemanusiaan global. Tanpa adanya data yang valid dan terkini dari UNOCHA, negara-negara donor dan lembaga kemanusiaan lain akan kesulitan menentukan prioritas dan arah bantuan yang efektif. Peran UNOCHA dalam mengelola dan mendistribusikan informasi membuktikan secara jelas penerapan fungsi *information* sebagaimana dikemukakan Clive Archer, yakni sebagai penyedia data terpercaya yang menopang seluruh proses koordinasi, pengambilan kebijakan, dan aksi kemanusiaan di Gaza ("OCHA Gaza Situation Report" 2023).

BAB 4

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA) menjalankan fungsi koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza periode 2023-2024 secara efektif melalui lima fungsi organisasi internasional menurut Clive Archer, meskipun menghadapi krisis genosida Israel yang menyebabkan >37.000 korban jiwa, 90% penduduk mengungsi, dan kehancuran infrastruktur masif. Pada fungsi articulation and aggregation, UNOCHA mengumpulkan kepentingan aktor kemanusiaan (PBB, NGO, donor) melalui Humanitarian Country Team (HCT), Cluster System, dan Joint Humanitarian Operations Center (JHOC) untuk menyusun Humanitarian

Response Plan (HRP) yang terintegrasi, memastikan prioritas seperti kesehatan, pangan, dan WASH tanpa duplikasi.

Fungsi rule application diwujudkan dengan memastikan penerapan Hukum Humaniter Internasional (IHL) melalui laporan *"Hostilities in the Gaza Strip"* yang mendokumentasikan pelanggaran terhadap warga sipil, akses bantuan, dan fasilitas publik, sambil mendorong kepatuhan pihak konflik. Socialization terjadi via forum koordinasi harian *Cluster Meetings* (ICCG) yang membiasakan aktor dengan prinsip *humanitarian principles (humanity, neutrality, impartiality, independence),* membentuk budaya kerja kolektif berbasis norma global. Operations activities mencakup koordinasi lintas-klaster, >5 juta layanan kesehatan, 630.000 porsi makanan harian, 90.000 m^3 air/hari (25% normal), MPCA untuk 1,36 juta orang, dan logistik 1.713 truk via Koridor Yordania. Terakhir, fungsi information dipenuhi melalui Situation Reports, Flash Updates, dan platform digital (ReliefWeb, media sosial) yang menyediakan data real-time korban, kerusakan, dan hambatan akses, menjadi dasar advokasi donor serta pengambilan keputusan global. Secara keseluruhan, UNOCHA berhasil menjaga respons kemanusiaan di tengah blokade, kendala keamanan, dan pendanaan terbatas, membuktikan peran sentralnya sebagai "arsitek" bantuan di Gaza.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa UNOCHA telah berhasil menjalankan fungsi-fungsi utama organisasi internasional dalam merespon krisis Gaza 2023–2024 secara efektif dan adaptif. Melalui koordinasi lintas lembaga, penegakan norma kemanusiaan, sosialisasi nilai-nilai universal, pelaksanaan kegiatan lapangan, serta penyediaan informasi faktual, UNOCHA menunjukkan kapasitasnya sebagai aktor kunci dalam sistem kemanusiaan

global. Akan tetapi, UNOCHA juga masih mengalami berbagai hambatan dan juga tantangan pada saat mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan di Gaza.

2.2 Rekomendasi

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup kajian dengan menganalisis koordinasi UNOCHA tidak hanya dalam konteks hubungan antar lembaga PBB, tetapi juga keterlibatannya dengan aktor-aktor non-PBB seperti organisasi kemanusiaan lokal, lembaga donor bilateral, dan jaringan masyarakat sipil di Gaza. Keterlibatan aktor lokal sering kali menjadi penentu efektivitas distribusi bantuan, sehingga studi lanjutan berpotensi memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika kolaborasi multilevel dalam situasi konflik. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji lebih rinci faktor-faktor politik, keamanan, dan kebijakan yang mempengaruhi ruang gerak UNOCHA, termasuk pembatasan akses, kontrol militer, serta tantangan diplomatik dalam upaya memasukkan bantuan ke wilayah yang diblokade. Analisis mengenai hambatan struktural tersebut akan memperkaya pemahaman tentang tantangan operasional lembaga kemanusiaan internasional dalam krisis berskala besar. Dengan ini, hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya literatur akademik sekaligus memberikan rekomendasi empiris yang lebih kuat bagi pengembangan strategi kemanusiaan internasional di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Nabit, Nasser. 2025. "Undermining Humanitarian Space in Conflict Epicenters: The Gaza Strip from the 2006 Blockade to Post-October 2023 War." *Journal of Information Systems Engineering and Management*.

ANTARA News. 2023. "WFP: Warga di Gaza hadapi bencana kelaparan." *ANTARA News*, Desember 22, 2023.

Archer, Clive. 2001. *International Organisations*. 3rd Edition. ed. N.p.: London & New York: Routledge.

Azzahra et al., Nisfah. 2024. "TINDAKAN KEJAHATAN INTERNASIONAL (GENOSIDA) YANG DILAKUKAN ISRAEL TERHADAP PALESTINA." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4 No 2 (Juli): 621. https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.168.

Emergency Telecommunications Cluster (ETC). 2024. "ETC Palestine SitRep #29." Emergency Telecommunications Cluster (ETC). https://etcluster.org/sites/default/files/documents/ETC%20Palestine%20SitRep%20%2329%202024_05_20.pdf.

farhat et al., Theresa. 2023. "Responding to the Humanitarian Crisis in Gaza: Damned if You Do… Damned if You Don't!" *Annals of Global Health*, (Agustus). 10.5334/aogh.3975.

"Gaza Strip Humanitarian Fact Sheet | December 2007 | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory." 2007. OCHA oPt. https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-humanitarian-fact-sheet-december-2007.

Human Rights Watch. 2023. "Israel: Blokade Ilegal di Gaza Mematikan bagi Anak-Anak Ketiadaan Air, Bahan Bakar, dan Listrik Membahayakan Kehidupan." Human Right Watch. https://www.hrw.org/id/news/2023/10/25/israel-unlawful-gaza-blockade-deadly-children.

Human Rights Watch (HRW). 2023. "Gaza: Serangan Tidak Sah Israel ke Rumah Sakit Memperburuk Krisis Kesehatan." Human Rights Watch (HRW). https://www.hrw.org/id/news/2023/11/30/gaza-unlawful-israeli-hospital-strikes-worsen-health-crisis.

Human Rights Watch (HRW), halaman "News Release / Berita". 2023. "Israel: Blokade Ilegal di Gaza Mematikan bagi Anak-Anak." Human Rights Watch. https://www.hrw.org/id/news/2023/10/25/israel-unlawful-gaza-blockade-deadly-children.

Karisha, Raden R. 2024. “DAMPAK TINDAKAN GENOSIDA OLEH ISRAEL TERHADAP KEHIDUPAN DI GAZA, PALESTINA.” *Sindoro Cendikia Pendidikan* Vol. 5 No 3:3.

Kaslam. 2024. “Solidaritas Global: Gerakan Kemanusiaan untuk Palestina di Indonesia.” *JURNAL USHULUDDIN* Volume 26 Nomor 1 (Februari): 41-43. https://doi.org/10.24252/jumdpi.v26i1.45592.

Mahardika, Mangku, Yuliarti, Gede, Dewa, Ni G. 2021. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SITUASI PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS KONFLIK BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA DALAM KASUS OPERATION CAST LEAD 27 DESEMBER 2008-20 JANUARI 2009).” *e-Journal Komunitas Yustisia* Volume 4 Nomor 2 (Agustus). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38154.

Nasrullah, Nashih. 2019. “Kondisi Gaza yang Kian tak Menentu Sejak Blokade Israel 2007.” *Republika Online*, Juli 1, 2019. https://internasional.republika.co.id/berita/ptxwmd320/kondisi-gaza-yang-kian-tak-menentu-sejak-blokade-israel-2007.

Nur Azhami, Nur Syafira, dan Muttaqin, Mochammad, Putri, Muhammad R. 2024. “Konflik Israel-Palestina: Peran PBB dan Pengaruh Pengakuan Palestina sebagai Negara Pengamat.” *PUSTAKA* Vol. 24, No. 2 (Agustus): 257-261. https://doi.org/10.24843/PJIIB.2024.v24.i02.p18.

OCHA. 2018. “This is OCHA.” OCHA. https://www.unocha.org/about-ocha.

OCHA. 2023. “OCHA – Cluster Coordination.” OCHA. https://www.ochaopt.org/.

OCHA. 2023. “Global Humanitarian Overview 2024 [EN/AR/FR/ES].” OCHA. https://www.unocha.org/publications/report/world/global-humanitarian-overview-2024-enarfres.

OCHA. 2024. “Humanitarian Principles in Practice.” OCHA. https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-principles.

OCHA. 2024. “UNOCHA – Cluster Coordination.” OCHA. https://www.unocha.org/our-work/coordination/cluster-coordination.

OCHA. 2025. “Humanitarian Situation Update #257 | Gaza Strip.” OCHA. https://www.unocha.org/publications/report/occupied-palestinian-territory/humanitarian-situation-update-257-gaza-strip.

OCHA oPt. 2024. “Responding to emergency needs amidst shrinking humanitarian space in the Occupied Palestinian Territory January-June 2024.” OCHA oPt. https://www.ochaopt.org/sites/default/files/RESPONDING-TO-EMERGENCY-NEEDS-OPT-2024-Mid-Year.pdf.

PRIAMBADA, YULIUS B. 2023. ““27 Hari Paling Mematikan di Gaza.”” *Kompas.id*, November 4, 2023. https://www.kompas.id/artikel/27-hari-paling-mematikan-di-gaza.

Reliefweb. 2008. “OPT: Gaza Humanitarian Situation Report 28 Dec 2008 16:00.” Reliefweb. https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/opt-gaza-humanitarian-situation-report-28-dec-2008-1600.

Reliefweb. 2014. “ACAPS Briefing Note: Humanitarian Impact of Operation Protective Edge in Gaza Strip, oPt (24 July 2014).” Reliefweb. https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/acaps-briefing-note-humanitarian-impact-operation-protective-0.

Sabbagh, Dan, and David Grossman. 2024. “More civilian casualties recorded in 2023 than any year since 2010.” *The Guardian*, January 8, 2024. https://www.theguardian.com/world/2024/jan/09/more-civilian-casualties-recorded-in-2023-than-any-year-since-2010-gaza.

Setiyono, Joko. 2020. *Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat*. Cetakan Pertama ed. Semarang: Pustaka Magister. https://www.scribd.com/document/737242259/0-Peradilan-Internasional-Pak-Joko.

Sidiq, Choiri, Umar, Moh. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Cetakan Pertama ed. Ponorogo: CV. Nata Karya. https://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf.

Sifana et al., Firdha. 2024. “Analisis Konflik Israel-Palestina Ditinjau dari Perspektif Instrumen HAM Internasional.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol 2 No 3 (Juni-September): 25.

Smith et al., Rhona K. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cetakan Pertama ed. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). https://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=fstream-pdf&fid=141&bid=9715&__cf_chl_tk=idzROEdJTSeb2PC9Ap5dhh6t47fVbBq4yh7vYGIM.M4-1764764113-1.0.1.1-uBn.LUiNSRfjfKEfGj.sYlr.ORrRrMyzYY0K..gti8JM.

Sumasa, Angel M. 2019. “KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM ASPEK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI DAERAH KONFLIK.” *Lex Et Societatis* Vol VII/No. 12 (Desember): 18. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27574.

UNICEF. 2024. “PSEA / AAP STANDARDS INTEGRATION IN CASH PROGRAMS.” UNICEF. https://www.unicef.org/sop/media/4941/file/PSEA-AA.%20Standards%20Integration%20in%20Cash%20Programs.pdf.

United Nations. 1948. “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.” https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc

%20.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf.
United Nations. 2024. “OCHA Interview: Humanitarian Notification System Team Leader.” United Nations. https://www.un.org/en/delegate/ocha-interview-humanitarian-notification-system-team-leader.
United Nations Coordination of Humanitarian Affairs. 2009. “Gaza Humanitarian Situation Report | 4 January 2009.” United Nations Coordination of Humanitarian Affairs. https://www.ochaopt.org/content/gaza-humanitarian-situation-report-4-january-2009.
United Nations General Assembly. 1991. “Resolution 46/182: Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United Nations.” United Nations General Assembly. www.ifrc.org.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2007. “Gaza Strip : OCHA Situation Report (28 June – 5 July 2007).” https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-201188.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2008. “Gaza Situation Report: The Impact of the Blockade on the Gaza Strip – A Human Dignity Crisis (15 December 2008).” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), wilayah “occupied Palestinian territory” / oPt. https://www.ochaopt.org/content/gaza-situation-report-impact-blockade-gaza-strip-human-dignity-crisis-15-december-2008.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2008. “Impact of blockade.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-209698.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2012. “OCHA on Message: The Role of the Humanitarian Coordinator and the Cluster System.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. https://www.unocha.org/publications/report/world/ocha-message-cluster-approach-enar.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2020. “Two years on: people injured and traumatized during the “Great March of Return” are still struggling.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. https://www.ochaopt.org/content/two-years-people-injured-and-traumatized-during-great-march-return-are-still-struggling.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2021. “Gaza Strip: Escalation of hostilities 10-21 May 2021.” United Nations Office for

the Coordination of Humanitarian Affairs. https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-escalation-hostilities-10-21-may-2021.

United Nations Office for the Coordination of humanitarian Affairs. 2023. “Humanitarian Response Plan 2023.” United Nations Office for the Coordination of humanitarian Affairs. https://www.ochaopt.org/coordination/hrp-2023.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2024. “Gaza Humanitarian Response Update | 13-19 May 2024 | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. https://www.ochaopt.org/content/gaza-humanitarian-response-update-13-19-may-2024.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2024. “Pembaruan Respons Kemanusiaan Gaza | 8-21 Juli 2024.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. https://www.ochaopt.org/content/gaza-humanitarian-response-update-8-21-july-2024.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2024. “Global Humanitarian Overview 2025 (Geneva concept note).” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. https://www.unocha.org/publications/report/world/global-humanitarian-overview-2025-geneva-concept-note.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2024. “Pembaruan Respons Kemanusiaan Gaza | 6-12 Mei 2024.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. https://www.ochaopt.org/content/gaza-humanitarian-response-update-6-12-may-2024.

United Nations Office for The Coordination of Humanitarian Affairs. 2024. “Our History.” United Nations Office for The Coordination of Humanitarian Affairs. https://www.ochaopt.org/about-us/our-history.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA). 2009. “Locked in: The humanitarian impact of two years of blockade on the Gaza Strip.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA). https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200187.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. 2024. “OCHA Gaza Crisis Updates.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. https://www.ochaopt.org/.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. 2024. “OCHA Humanitarian Needs Overview – pendanaan tidak mencukupi.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. https://www.ochaopt.org.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. 2024. “OCHA – laporan kerusakan infrastruktur.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. https://www.ochaopt.org/about-us/our-history?utm_source.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. 2024. “situasi keamanan dan perlindungan staf.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. https://www.ochaopt.org.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. 2025. “OCHA Situation Reports – pemadaman komunikasi menghambat penilaian kebutuhan.” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Occupied Palestinian Territory. https://www.ochaopt.org/.

UN System. 2019. “Handbook on the UN System of Organizations and Agencies. New York: United Nations.” UN System. https://www.understandingtheun.org/documents/The-UN-at-country-level-handbook.pdf.

Zhao et al., Qikang. 2024. “"Satellite and AI monitoring humanitarian crises in the Gaza Strip during the early stage of Israeli–Palestinian conflict."” *INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH* VOL. 17, NO. 1,. https://doi.org/10.1080/17538947.2024.2430678.